



# PERDAGANGAN KOPI DI TANA TORAJA

1880 - 1910



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. ter	10 - 11 - 95
Abs.	F. Sastra
Subj.	243
Harga	Hardisk
No. Inventaris	95 10 - 11 - 446
No. Kias	

08 07 200

## SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra  
pada Fakultas Sastra  
Universitas Hasanuddin

## UJUNG PANDANG

1995

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor : 646/PT04.H5.FS/C/1994 tanggal 6 April 1994, dengan ini kami menerima skripsi ini

Ujung Pandang,

1995

Pembimbing Utama



Dr. EDWARD L. POELINGGOMANG

Pembantu Pembimbing



Drs. BAMBANG. S. N.S.

Disetujui untuk diteruskan  
kepada Panitia Ujian Skripsi

Dekan

u.b. Ketua Jurusan Sejarah dan Arkeologi  
Fakultas Sastra UNHAS



Drs. DAUD LIMBUGAU. S.U.

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS SASTRA

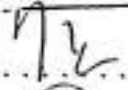



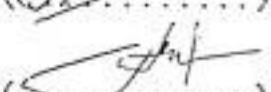
Pada hari ini Rabu tanggal 1 Pebruari 1995 Tim penguji menerima baik Skripsi dengan judul :

PERDAGANGAN KOPI DI TANA TORAJA 1860 - 1910

Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir sarjana pada Jurusan Sejarah Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, 1995

TIM PENGUJI

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Drs. Baharuddin Batalipu           | <br>Ketua        |
| 2. Drs. Daud Limbugau, S.U            | (  ) Sekretaris |
| 3. Drs. Harun Kadir                   | (  ) Anggota     |
| 4. Drs. Anwar Thosibo, M.Hum          | (  ) Anggota     |
| 5. Drs. Edward L. Poelinggomang, M.A. | (  ) Anggota     |
| 6. Drs. Bambang S. MS                 | (  ) Anggota     |

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmatnya yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa ilmu yang penulis miliki, belum cukup untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang benar-benar bermutu. Walaupun demikian, penulis mencoba menulis suatu karya ilmiah, atas bantuan dari berbagai pihak seperti yang ada sekarang.

Dengan selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Edward L. Poelinggomang, sebagai konsultan I yang telah banyak memberi petunjuk, nasehat dan bimbingannya.
2. Bapak Drs. Bambang, S, M.S. sebagai konsultan II yang telah sudi meluangkan waktunya membimbing dan mendorong penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Para dosen di Jurusan Sejarah dan Arkeologi Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya selama penulis berada di bangku kuliah.
4. Kedua orang tua, keluarga dan sahabat serta teman-teman terdekat yang telah memberikan biaya, motivasi dan nasehat secara kontinu kepada penulis.

5. Rekan - rekan sesama mahasiswa yang telah bersedia memberikan bantuannya, berupa buku-buku maupun bantuan lainnya, serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, diucapkan banyak terima kasih atas bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, semoga segala sumbangsih dan jerih payah serta usaha kita bersama dalam memajukan ilmu pengetahuan mendapat ridho dari Allah SWT.

Ujung Pandang, 1995

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB. I PENDAHULUAN .....	1
A. Alasan Memilih Judul .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Metodologi .....	8
BAB. II TORAJA DAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI KOLONIAL ....	12
A. Tana Toraja : Alam dan Budayanya .....	12
B. Kehidupan Politiknya .....	17
C. Pengembangan Tanaman Komoditi Ekspor di Sulawesi Selatan .....	24
D. Toraja dan Kopinya .....	29
BAB. III PERDAGANGAN KOPI DI TANA TORAJA .....	34
A. Pola Perdagangan .....	34
B. Jaringan Perdagangan .....	41
C. Perang Kopi Sebab dan Akibatnya .....	49
BAB. IV CAMPUR TANGAN KOLONIAL.....	55
A. Kebijakan Ekonomi Hindia Belanda .....	55
B. Pendudukan Hindia Belanda 1905-1909 .....	60
C. Peranan Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi Lokal .....	66
D. Perkembangan Perdagangan .....	72

BAB. V PENUTUP .....	78
DAFTAR PUSTAKA .....	80

## BAB I

## P E N D A H U L U A N

A. Alasan Memilih Judul

Pembicaraan mengenai perdagangan kopi di Tana Toraja secara khusus dan Sulawesi Selatan pada umumnya untuk kurun waktu paroh kedua abad XIX dan awal abad XX sangat menarik. Perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan dan Tana Toraja khususnya untuk kurun waktu itu sangat kompleks, sebagai akibat dari kondisi politik dan cara berpikir masyarakat. Kurun waktu ini ditandai oleh kekuasaan dan pemerintahan Hindia Belanda yang memberikan warna tersendiri bagi pola perdagangan. Pola perdagangan yang diikuti oleh kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda, mengakibatkan munculnya pola dagang yang cukup unik dan menarik untuk dikaji. Sisi lain, kemampuan berfikir masyarakat untuk mengikuti pola dan bentuk perdagangan tersebut masih sangat rendah. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan dua bentuk/pola perdagangan yang berbeda.

Kebijaksanaan ekonomi Hindia Belanda yang diawali oleh sebuah penerapan sistem tanam<sup>1</sup>, khususnya yang terdapat di daerah Jawa juga merupakan salah satu ciri khusus untuk kurun waktu itu. Kebijakan ekonomi

---

<sup>1</sup>Daud Limbugau, Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824 - 1874. (Jogjakarta : Tesis Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1985), hlm. 84.



Hindia Belanda ini pula, sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan ekonomi dan pola perdagangan selanjutnya di Sulawesi Selatan dan Tana Toraja secara khusus.

Dengan dasar dan titik tolak kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda ini, mengakibatkan adanya upaya menanam tanaman yang bernilai komoditi ekspor termasuk tanaman kopi pada daerah-daerah tertentu di Sulawesi Selatan, utamanya pada daerah-daerah ketinggian, seperti Tana Toraja.

Pengenalan tanaman kopi pada masyarakat Tana Toraja dan daerah - daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang didukung oleh kondisi alamnya yang memungkinkan untuk tanaman ini semakin nampak pada kurun waktu paroh kedua abad XX, dengan meningkatnya hasil-hasil komoditi ekspor tersebut, termasuk tanaman kopi. Berhasilnya tanaman kopi di Sulawesi Selatan, telah mengakibatkan munculnya usaha-usaha pemerintah Hindia Belanda untuk memonopoli hasil-hasil pertanian rakyat utamanya tanaman komoditi ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan hasil-hasil hutan lainnya.

Berhasilnya tanaman komoditi ekspor di wilayah Sulawesi Selatan pada kurun waktu tersebut, telah melatarbelakangi tentang lahirnya kebijaksanaan Hindia Belanda, termasuk kebijaksanaan dagang yang terdapat di

pelabuhan Makassar<sup>2</sup>. Bahkan keberhasilan komoditi ini, mengakibatkan pelabuhan Makassar sebagai pintu gerbang perdagangan di wilayah Timur Indonesia untuk kurun waktu itu, mengalami pasang surut dan perubahan-perubahan kebijaksanaan. Pelaksanaan pelabuhan bebas pajak yang diberlakukan sejak 1 Januari 1847<sup>3</sup>, sebagai suatu bukti kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan perdagangan di wilayah ini. Kebijakan itu sekaligus merupakan strategi politik pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena beratnya persaingan negara - negara Eropa dalam perdagangan internasional khususnya untuk pasaran Eropa.

Sisi lain, di Tana Toraja sebagai salah satu daerah penghasil tanaman komoditi ekspor menjadi sasaran para pedagang, baik perantara maupun para pedagang yang bertaraf internasional. Kehadiran para pedagang baik pedagang pribumi yang berfungsi sebagai perantara atau pedagang lainnya seperti Cina, Arab, Philipin, dan lain-lainnya mengakibatkan munculnya pola-pola perdagangan yang cukup rumit. Ini diakibatkan oleh persaingan ketat untuk

<sup>2</sup>Edward L. Poelinggomang, Transportasi dan Jaringan Perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur Pada Periode Kolonial. (Ujungpandang : Makalah Seminar MSI Cabang Sulawesi Selatan, 1993), hlm. 4, menyangkut kebijaksanaan pelabuhan bebas.

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 5



memperoleh barang dagangan dalam jumlah besar, dan memperoleh keuntungan yang banyak dari hasil pertanian pribumi (orang-orang Toraja). Kondisi ini mengakibatkan munculnya aspek-aspek lain di Tana Toraja. Aspek-aspek yang dimaksudkan disini adalah adanya perdagangan hasil bumi yang selanjutnya dibarengi oleh eksploitasi tenaga manusia dalam bentuk perbudakan (budak berhutang, budak pusaka, budak pengikut)<sup>4</sup>. Aspek ini merupakan salah satu aspek kehidupan masyarakat Tana Toraja, yang berlangsung sampai pada awal abad XX.

Munculnya persaingan yang ketat dalam perdagangan komoditi ekspor di Tana Toraja, juga berakibat lain. Persaingan ini mengakibatkan munculnya pertikaian dan persaingan para pedagang yang datang di Tana Toraja, puncaknya yakni terjadinya perang kopi pada sekitar tahun 1889-1890 sebagai konsekuensi logis dari persaingan tersebut.

Terjadinya perang kopi (perang antara pedagang yang datangnya dari Bugis dan pedagang dari Luwu), mungkin juga disebabkan oleh adanya tendensi politik sebagai usaha monopoli hasil-hasil pertanian oleh orang-orang asing lainnya. Satu bukti dari laporan Braam Morris bahwa pada

---

<sup>4</sup>Anwar Tosibo, "Hamba Sahaya dan Orang Berhutang Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Abad XIX." (Ujungpandang : Makalah Seminar MSI Cabang Sulawesi Selatan, 1993), hlm. 12.

kurun waktu 1860-an, penanaman kopi termasuk hasilnya yang terdapat di Tana Toraja dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat, ditandai oleh meningkatnya jumlah yang diekspor keluar. Walaupun menurut beliau untuk kurun waktu ini, sebenarnya penanaman kopi di Tana Toraja baru dalam tahap permulaan<sup>5</sup>.

Perkembangan komoditi ekspor seperti kopi, lada, teh, tebu, kelapa, dan lain-lain di Indonesia secara umum termasuk di Sulawesi Selatan, mengundang perhatian khusus pemerintah Hindia Belanda. Perhatian ini ditandai oleh perluasan kekuasaan Belanda baik di Jawa maupun di luar Jawa. Perluasan kekuasaan ini dilatarbelakangi oleh tendensi ekonomi atau latarbelakang ekonomi<sup>6</sup>.

Pada awal abad XX Belanda mengadakan perluasan kekuasaan yang terutama ditujukan kepada daerah-daerah di luar Jawa termasuk di Sulawesi Selatan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menciptakan keamanan untuk menjamin berhasilnya usaha penanaman modal swasta Belanda dan modal asing lainnya di Indonesia.

---

<sup>5</sup>Braam Morris, Het Landschap Luhu Getroken Witeen Rapport Van Den Gouverneur Van Celebes. (S-Gravenhagen : Martinus Nijhoff), hlm. 498. Lihat juga Edward L. Poelinggomang, Proyeksi dan Perdagangan Bebas Kajian Tentang Perdagangan Makassar Pada Abad ke-19. (Amsterdam : Centrale Huisdrukkerij, 1991), hlm. 84.

<sup>6</sup>Edward L. Poelinggomang, Op.Cit., hlm. 85. Penjelasan rinci akan dibahas selanjutnya.

- b. Menguasai tanah yang potensial untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam usaha memperluas penanaman modal swasta di Indonesia.
- c. Mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya di kerajaan-kerajaan di luar Jawa<sup>7</sup>.

Usaha Belanda pada kurun waktu itu, akhirnya berhasil setelah mampu mengalahkan seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada tahun 1909, termasuk Tana Toraja. Kemenangan Belanda untuk kurun waktu itu, dengan sendirinya akan mempengaruhi bentuk perdagangan selanjutnya. Bukti ini dapat dilihat pada pembukaan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan wajib pajak sejak tahun 1908<sup>8</sup>.

#### B. Permasalahan

Dalam kurun waktu paroh kedua abad XIX dan awal abad XX, di Sulawesi Selatan terjadi perubahan-perubahan yang cukup kompleks dalam aktivitas kesejarahan. Perubahan - perubahan itu dengan sendirinya akan mempengaruhi daerah-daerah pedalaman Sulawesi Selatan seperti Tana Toraja.

---

<sup>7</sup>Muh. Abduh, et.al. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan. (Jakarta : Depdikbud, 1985), hlm. 96.

<sup>8</sup>Bambang Sulistyio. "Perdagangan Bebas di Makassar Pada Abad XIX Tinjauan Dimensi Sosial Politik". (Ujungpandang : Makalah Seminar MSI Cabang Sulawesi Selatan, 1993), hlm. 13.

Perubahan pertama, yakni menyangkut perubahan penanganan ekonomi pemerintahan sejak tahun 1799, yakni dengan dibentuknya VOC (Verenigde Oost Indisch Compagnie) oleh Pemerintah Belanda, yang merupakan perubahan bentuk kebijaksanaan ekonomi. Sistem tanam dari tanaman kebutuhan pokok, beralih kepada penanaman tanaman komoditi. Bahkan lebih jauh mempengaruhi kebijaksanaan pelabuhan bebas sebagai sasaran pelayaran keluar untuk kurun waktu ini dari pelabuhan bebas, berubah menjadi pelabuhan wajib pajak pada awal abad ke-20. Disamping itu perubahan strategi penguasaan Belanda sendiri, hingga pada awal abad ke-20 dengan perluasan kekuasaan di luar Jawa termasuk Sulawesi Selatan dan Tana Toraja secara khusus dengan tujuan penanaman modal swasta Belanda yang semakin menguntungkan.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut di atas, maka setelah pada gilirannya nanti akan mempengaruhi bentuk perdagangan utamanya perdagangan barang-barang komoditi termasuk kopi. Tana Toraja sebagai salah satu penghasil tanaman komoditi berupa kopi untuk kurun waktu ini, dengan sendirinya akan merasakan perubahan-perubahan pola politik dan perubahan kebijaksanaan ekonomi Hindia Belanda.

Dengan demikian, maka permasalahan utama berkaitan dengan perdagangan kopi di wilayah Tana Toraja pada tahun 1860 - 1910, adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi penggalakan penanaman kopi di Tana Toraja ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perdagangan yang berlaku di Tana Toraja sejak berhasilnya tanaman komoditi kopi ?
3. Sejauh mana pengaruh berhasilnya tanaman kopi di Tana Toraja terhadap keikutsertaan pedagang-pedagang pribumi dan asing dalam perdagangan di Tana Toraja dan Sulawesi Selatan pada umumnya ?

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini, adalah :

1. Ingin mengungkapkan sejarah penanaman kopi di Sulawesi Selatan secara umum dan Tana Toraja secara khusus.
2. Untuk mengungkapkan bentuk-bentuk perdagangan komoditi, pada kurun waktu paroh kedua abad XIX dan awal abad XX.
3. Mengungkapkan keterlibatan pedagang-pedagang pribumi dan asing dalam perdagangan komoditi di Sulawesi Selatan dan Tana Toraja secara khusus.

### C. Metodologi

Proses untuk menghasilkan karya sejarah sebagai tulisan ilmiah, menuntut seorang penulis untuk berpegang pada metode sejarah. Metode ini utamanya menyangkut pengumpulan data, pengolahan data dan bentuk penulisannya. Metode seperti ini diharapkan dapat memberikan analisa tajam terhadap rekonstruksi masa lampau.

Pengkajian masa lalu, pengumpulan data merupakan penunjang utama. Untuk hal itu, pengungkapan mengenai

perdagangan kopi di Tana Toraja, dibutuhkan sumber-sumber tertulis baik berupa laporan - laporan, laporan resmi pemerintah dalam bentuk arsip dan tulisan-tulisan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Pengumpulan sumber informasi tentang perdagangan tersebut, baik melalui laporan resmi berupa arsip atau pada buku-buku, makalah dan artikel yang telah ada, diharapkan dapat memberikan daya imajinasi bagi penulis untuk mengungkapkan permasalahan ini secara detail.

Hasil - hasil penelitian berupa sumber - sumber tertulis tersebut di atas, selanjutnya akan diseleksi dan dianalisa untuk mendapatkan kredibilitas dan viliditas data. Tindakan ini dipandang perlu karena tidak terelakkan bahwa sumber - sumber yang diperoleh tidak terlepas dari subjektivitas.

Pengumpulan data dan pengolahan data di atas diharapkan akan menjadi acuan dalam rekonstruksi masa lampau khususnya perdagangan kopi di Tana Toraja, secara menyeluruh untuk kurun waktu 1860-1910. Disamping itu dengan kerangka kerja seperti ini, menjadi dasar untuk mengungkapkan masa lalu sebagaimana adanya, dengan menempatkan peristiwa itu dengan objektivitas yang tinggi.

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing - masing ; Bab I akan membahas tentang permasalahan - permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan kopi di Tana Toraja, pada kurun waktu 1860 sampai dengan tahun 1910.



Pernmasalahan ini diangkat berdasarkan pola - pola perdagangan kopi ( komoditi ekspor ) pada masa itu. Disamping itu pula ketentuan - ketentuan politik penguasa pada kurun waktu ini sangat kompleks. Dalam bab pertama ini juga akan dibahas tentang metode - metode pengumpulan data, pengolahan data dan metode penulisan skripsi ini sendiri.

Bab II membicarakan mengenai Toraja dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya. Pada pembahasan bab II akan dikemukakan kondisi Tana Toraja baik berupa kondisi alam maupun budaya masyarakatnya sebelum dan pada kurun waktu ( batasan waktu di atas ). Bab II ini juga akan mengetengahkan keterkaitan antara kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda dengan perkembangan tanaman komoditi (kopi) di Tana Toraja. Demikian kaitannya dengan pengembangan komoditi ekspor di Sulawesi Selatan pada umumnya.

Bab III membicarakan tentang perdagangan kopi di Tana Toraja. Pada bab ini akan dikemukakan pola - pola perdagangan kopi di Tana Toraja untuk kurun waktu 1860-1910, daerah - daerah yang menjadi sasaran atau jalur perdagangannya. Bab III ini juga akan mengemukakan tentang perang kopi dan akibat - akibat yang ditimbulkan termasuk pihak yang terlibat dan latarbelakangnya.

Pada bab IV, dikemukakan tentang campur tangan langsung pihak pemerintah Hindia Belanda dalam perdagangan dan pola kebijaksanaan politik di Tana Toraja untuk

tahap-tahap akhir imperialisme. Dalam bab ini juga akan dikemukakan tentang peranan pemerintah Hindia Belanda dan kebijaksanaan terhadap perdagangan kopi di Tana Toraja. Pada lain pembahasan pada bab IV akan dikemukakan pola - pola dan kebijaksanaan kopi di Tana Toraja pada tahun 1910 yakni setelah imperialisme Belanda telah berlaku di Sulawesi Selatan secara umum.

Bab V berupa bab penutup akan menyimpulkan hasil - hasil penulisan berupa jawaban atas permasalahan - permasalahan yang ada. Pembahasan ini sekaligus merupakan hasil penulisan ini.

BAB II  
TORAJA DAN KEBIJAKSANAAN  
EKONOMI KOLONIAL

A. Tana Toraja : Alam dan Budayanya

Dalam laporan Braam Morris dikatakan bahwa penamaan "Toraja" diberikan oleh mereka yang tinggal di pantai. Menurut Braam Morris, kata "Toraja" tersusun dari kata To atau Tau (orang), ri (di sana) dan aia (sebelah darat atau pedalaman). To adalah suatu kependekan dari kata Tau dan raia dari riaia sehingga menjadi "Toraja" artinya "orang-orang dari pedalaman"<sup>1</sup>. Karena pedalaman dari daerah-daerah Sulawesi adalah pegunungan, maka mereka disebut "orang-orang pegunungan".

Berdasarkan pembahasan seperti di atas, maka penunjukan terhadap orang-orang Tana Toraja dapat diartikan sebagai berikut yaitu orang-orang yang hidupnya di pedalaman atau pegunungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alam Tana Toraja adalah berupa jejeran gunung-gunung.

Wilayah Tana Toraja seperti dicatat oleh T. Tangdilintin meliputi wilayah yang disebut Tondok Lembangan Bulan yang meliputi daerah dengan batas-batasnya sebagai berikut :

<sup>1</sup>D.F. Van Braam Morris. Het Lanschap Luwu Getroken uit een Rapport Van Gouverneur Van Celebes. (S-Gravenhagen : Martinus Nijhoff), hlm. 21. D.F. Van Braam Morris, Kerajaan Luwu Menurut Catatan D.F. Van Braam Morris. (Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993), hlm. 21.

- a. Sebelah utara dengan batas daerah Poso dan Donggala.
- b. Sebelah timur dengan batas daerah Kerajaan Luwu, yaitu dataran pantai Teluk Bone termasuk daerah Kerajaan Luwu pada bahagian pegunungan termasuk daerah Tondok Lepongan Bulan.
- c. Sebelah selatan dengan batas gunung Sinaji membujur ke sebelah barat melalui Enrekang terus ke Mandar.
- d. Sebelah barat dengan batas dataran pantai Barat Sulawesi Selatan pada bahagian pegunungannya dan dataran pantai termasuk daerah Kerajaan Mandar<sup>2</sup>.

Mengenai wilayah Tana Toraja, juga disinggung oleh Braam Morris yang mana disebutkan bahwa wilayah Tana Toraja adalah sekitar 500 mil dengan jumlah penduduk kurang lebih 150.000 jiwa pada tahun 1890. Braam Morris dalam analisisnya tentang Tana Toraja pada masa ini dikatakan ; supaya perhitungan penduduk di Tana Gubernemen ditetapkan sebagai ukuran yang dapat diterima, yang mana bahwa tiap persegi pal diam (didiami) 127 jiwa ; sedang untuk tanah-tanah kerajaan adalah 60 jiwa atas satu persegi empat pal. Dengan demikian apabila satu mil persegi empat adalah sama dengan lima persegi pal, maka negeri Tana Toraja akan meliputi luas 2.500 pal persegi empat.

---

<sup>2</sup>T. Tangdilintin, Tana Toraja dan Kebudayaannya ( Tana Toraja : Yayasan Lepongan Bulan (YALBU), 1981 ), hlm. 50.



Apabila angka ini dikalikan dengan 50 jiwa, menghasilkan jumlah 150.000 jiwa<sup>3</sup>.

Wilayah Tana Toraja merupakan jejeran gunung-gunung. Karena wilayah itu merupakan jejeran gunung-gunung, sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah yang dingin. Kondisi wilayah seperti ini, melatarbelakangi mata pencaharian hidup masyarakat. Dalam laporan Braam Morris dikatakan bahwa orang-orang Toraja termasuk gemar bertani. Tanaman yang biasa ditanam oleh orang-orang Toraja, seperti Padi, Jagung, dan berbagai tanaman seperti Kopi dan Tembakau. Pemeliharaan pertanian atau mengatur penanaman tidak dilakukan secara bergantian sesudah padi atau jagung dipanen. Kebun-kebun mereka ditanami dengan pohon-pohon yang pemeliharaannya diserahkan pengurusannya kepada alam. Sedangkan tanaman tembakau hanya ditanam untuk keperluan sendiri.

Mengenai peternakan di Tana Toraja pada kurun waktu 1861 dikatakan bahwa orang Toraja mempunyai banyak kerbau, kuda dan babi. Khusus untuk peternakan babi, merupakan usaha sampingan yang utama, karena dagingnya lebih diutamakan daripada kerbau<sup>4</sup>. Selain itu wilayah Tana Toraja yang bergunung-gunung, dengan hutan-hutan yang lebat mengakibatkan adanya binatang-binatang liar seperti

<sup>3</sup>Braam Morris. *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

babi, rusa, dan anoa yang mana dikalangan orang Toraja anoa terkenal dengan sebutan Tokata (antilopen)<sup>5</sup>.

Dalam inspeksi J.A. Bakkers pada tahun 1861, di berbagai daerah dikatakan bahwa penanaman kopi di daerah Tana Toraja dari tahun ke tahun meningkat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah yang di ekspor ke luar melalui Luwu. Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun sebenarnya tanaman kopi di wilayah ini baru dalam tahap permulaan<sup>6</sup>.

Penduduk Tana Toraja dengan jumlah 150.000 jiwa seperti yang diperkirakan oleh Braam Morris, dalam kehidupan sehari-harinya mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya dengan mempergunakan bahasa yang disebut "Bahasa Toraja"<sup>7</sup>. Braam Morris mengemukakan bahwa "Bahasa Sangngalla" rupanya menjadi bahasa suku Toraja. Alasannya bahwa Bahasa Sangngalla mempunyai banyak persamaan dengan Bahasa Toraja, yang dipakai di seluruh wilayah Toraja sampai pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Mandar. Suatu hal yang perlu dicatat mengenai Bahasa Toraja yang dilaporkan oleh Braam Morris dengan mengutip pendapat Matthes laporan tersebut sebagai berikut :

Menurut Matthes, bagiku percaya bahwa baik bahasa Makassar maupun bahasa Bugis adalah suatu penghalusan

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 13.

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 10 dan 13.

<sup>7</sup>Ibid, hlm. 34.

dari bahasa Toraja. Lain daripada itu bahasa Bugis berasal dari Luwu, darimana ia dengar lambat laun menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan dimana dia dengan pertemuan dari penduduk pribumi dan orang-orang asing berturut-turut menjadi halus dan berubah. Pendapat ini bertolak pada alasan, bahwa banyak kata-kata Bugis dan Makassar yang diperbandingkan dengan kata-kata Toraja. Contohnya menurut Matthes, orang-orang Toraja tidak mengucapkan apa yang dinamai adama kaca (s) dari orang-orang Bugis diucapkan a umpananya dalam kata Paimeng Makkeda, dalam bahasa Toraja diucapkan dengan Paimang Makada<sup>8</sup>.

Penduduk Tana Toraja juga dilaporkan oleh Braam Morris dengan menempatkannya sebagai penduduk yang asalnya dari suku Batak, sama halnya dengan orang-orang Dayak dari Kalimantan. Alasan penempatan penduduk Toraja sebagai suku Batak sama dengan suku Dayak yakni dilihat dari cara hidup mereka, kebiasaan dan adat mereka terutama tentang pemenggalan kepala, tampak sekali persamaannya satu dengan yang lainnya. Disamping itu memiliki mitologi bahwa nenek moyang datangnya terdampar dari laut pada waktu itu, disaat semuanya masih berada di bawah genangan air, kecuali puncak-puncak dan gunung-gunung tinggi kepunyaan mereka. Selanjutnya dikatakan bahwa menurut pendapat orang awam (bukan ahli), bahwa orang-orang Toraja dan Dayak adalah dari asal yang sama<sup>9</sup>.

Khusus mengenai kebiasaan dan adat pemenggalan kepala yang terdapat dalam wilayah kebudayaan Tana Toraja, telah diidentifikasi sebagai bagian aluk todolo

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 37.

<sup>9</sup>Ibid, hlm. 21.

(agama leluhur atau agama purba)<sup>10</sup>. Kebiasaan ini dinamakan acara Makbarata - Adat Makbarata (mengorbankan manusia) pada upacara pemakaman/upacara rambu solok adalah adat yang diadakan sebagai penghormatan atau sebagai tanda kepahlawanan/keberanian dari seorang bangsawan yang berjasa dalam mempertahankan daerah Tana Toraja terutama dalam perang To pada Tindo Misa Pangngimpi serta perang saudara pada permulaan abad XIX<sup>11</sup>. Adat atau kebiasaan seperti ini menurut Tangdilintin, berlangsung sampai masuknya pemerintahan Hindia Belanda di Tana Toraja. Masuknya Hindia Belanda yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pasifikasi secara umum di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan dan Tana Toraja secara khusus. Tana Toraja, diduduki oleh pemerintah Hindia Belanda secara resmi, setelah kekalahan ditandai oleh tertangkapnya pahlawan Tana Toraja "Pongtiku" pada tahun 1907<sup>12</sup>.

#### B. Kehidupan Politiknya

Paling tidak ada dua versi tentang awal mula munculnya Tana Toraja. Sebuah cerita rakyat tentang pendukung awal Tana Toraja, telah diungkapkan oleh T. Tangdilintin. Beliau menulis bahwa, yang pertama-tama

<sup>10</sup>T. Tangdilintin. Op-cit. hlm. 72.

<sup>11</sup>Ibid. hlm. 147.

<sup>12</sup>Bigalke, T. A Social History of "Tana Toraja 1870-1965" (Madison: University of Wisconsin, 1981), hlm. 68



menguasai Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo pada jaman purba adalah penduduk yang berasal dari daerah pulau Sulawesi yang diperkirakan datang sekitar abad ke-6. Ia berpendapat bahwa kedatangan penduduk pertama itu mempergunakan perahu-perahu/sampan melalui sungai-sungai besar, yang kemudian terdampar dan meninggalkan perahu mereka. Setelah itu mereka terus menuju pegunungan Sulawesi Selatan dan akibatnya menduduki/menempati daerah pegunungan termasuk Tana Toraja<sup>13</sup>.

Kedatangan orang-orang ke wilayah pegunungan ini, dengan berkelompok-kelompok dipimpin oleh seorang yang dinamai Ambe' Arroan (Ambe' = Bapak, Arroan = kelompok manusia). Kelompok-kelompok inilah yang selanjutnya mendukung wilayah yang sekarang disebut Tana Toraja. Berdasarkan konsep dasar mengenai kedatangan orang-orang pendukung masyarakat Toraja dan perkembangan selanjutnya, kelihatannya cukup mendukung. Hal ini terjadi pada kelompok adat yang masing-masing dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut "Ma'dika" yang dibantu oleh seorang "To Makaka" dan kepala-kepala bawahan<sup>14</sup>.

Versi kedua tentang awal pendukung Tana Toraja, seperti diungkapkan dalam laporan D.F. Van Braam Morris, bahwa orang-orang Toraja menganggap bahwa moyangnya datang

<sup>13</sup>T. Tangdilintin, *Op-cit.*, hlm. 6.

<sup>14</sup>Braam Morris, *Op.cit.*, hlm. 51.

dari laut. Konon dinamai Tonabusa di Lembang (yang datang dan terdampar karena tidak dapat melanjutkan perjalanan). Dikatakan bahwa orang-orang tersebut di dalam perjalanan selanjutnya dilontarkan di pegunungan Toraja yang ketika itu hanya dapat dilihat dari puncak-puncak gunung tinggi di Toraja, sedang semua sisa-sisa negeri lainnya masih dibawah genangan air<sup>15</sup>.

Hal ikhwal To Manurung, juga dikemukakan oleh T.Tangdilintin, yang menyebutkan tiga orang To Manurung yang terkenal masing-masing :

- a. Tomanurung : Manurun Langi' di Kesu'
- b. Tomanurung : Tambaro Langi' di Kandora
- c. Tomanurung : Kambiolangi' di Kaero.

Khusus untuk Tomanurung Tamboro Langi' dikisahkan bahwa dalam perkawinannya dengan seorang putri dari istana/Tongkonan Sapen Deata Onkama Lando Bilik melahirkan 8 orang anak, empat perempuan dan empat laki-laki. Salah seorang dari putrinya itu yakni Lando Baro kawin dengan seorang yang bernama Datni Pattuang yang melahirkan dua orang anak masing-masing :

1. Puang Mate Malolo (Perempuan).
2. Puang Laki Padada (Laki-Laki).

Selanjutnya dikisahkan bahwa Laki Padada kawin dengan seorang putri raja Gowa yang bernama Karaeng Tora Salo.

<sup>15</sup>Ibid. hlm. 63.

yang dalam perkawinannya itu melahirkan 3 orang anak masing-masing :

- a. Petta La Bantan berkuasa di Tondok Lepongan Bulan/Tana Toraja dengan gelar Matasak ri Lepongan Bulan atau Matasak ri Tana Toraja.
- b. Petta La Merang berkuasa di Gowa dengan gelar Somba ri Gowa.
- c. Petta La Bungu berkuasa di Luwu' atau Wara dengan gelar Payung ri Luwu atau Wara<sup>16</sup>.

Selanjutnya dikisahkan bahwa Petta La Bantan selanjutnya memegang pucuk pimpinan dengan tugas melanjutkan peranannya sebagai pusat pelaksanaan adat dan kepemimpinan di Tana Toraja.

Sebagaimana kita ketahui ada satu hal yang cukup menarik dalam pemerintahan di Tana Toraja, yakni sejauh ini belum pernah diketemukan penyatuan kelompok-kelompok adat (arroan) dalam satu kesatuan sebagai satu kerajaan. Kelompok-kelompok adat itu masing-masing berkembang sebagai suatu kelompok tersendiri dengan ikatan sebagai pemersatu adalah Tongkonan. Tongkonan sekaligus merupakan lambang ikatan kekeluargaan dan kepemimpinan<sup>17</sup>. Struktur pemerintahan yang didasarkan pada kelompok-kelompok adat tersebut di atas, berkembang sampai masuknya pengaruh-

<sup>16</sup>Op.cit. hlm. 39.

<sup>17</sup>T. Tangdilintin. Ibid. hlm. 157.

pengaruh dari luar. Dalam catatan T. Tangdilintin disebutkan bahwa pengaruh pertama di Tana Toraja, yakni masuknya pedagang-pedagang Bugis Makassar. Pada sekitar abad ke-15 datang ke Tana Toraja sejumlah pedagang yang membawa bermacam-macam barang seperti porselin, tenunan-tenunan kapas, bentuk-bentuk perhiasan emas dan lain-lain. Disebutkan bahwa yang pertama-tama datang di Tana Toraja adalah sekelompok pedagang yang dipimpin oleh seorang pedagang besar yang bernama Puang Rade<sup>18</sup>.

Pada abad ke-17, Tana Toraja mulai dimasuki oleh pedagang-pedagang dari kerajaan Bone, Sidenreng dan Luwu. Hal-hal yang menarik di Tana Toraja, yakni dikenalnya emas bubuk. Perkembangan kerajaan Bone dibawah pemerintahan raja Arung Palakka yang telah menguasai daerah-daerah selatan Tana Toraja<sup>19</sup>. Maka pada pertengahan abad ke-17 atau tahun 1675 Arung Palakka menyerbu Tana Toraja dan terus menduduki seluruh daerah bagian selatan dan tengah. Penyerbuan tentara Arung Palakka tersebut dikenal dengan istilah "Kasaeanna To Bone" (datangnya orang-orang Bone)<sup>20</sup>. Mengenai perang yang terjadi di Tana Toraja pada

---

<sup>18</sup>Ibid. hlm. 57.

<sup>19</sup>Penguasaan Arung Palakka di daerah-daerah selatan, seperti Sidenreng, Massenrempulu dan Duri misalnya berkaitan dengan Peng-Islaman (Peng-Islaman Bone di Sulawesi Selatan).

<sup>20</sup>Ibid. hlm. 58.

pertengahan kedua abad ke-17 ini, juga diungkapkan dalam lontarak Raja Gowa dan Tallok, dengan menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Januari 1686 berangkatlah orang-orang yang hendak berperang ke Barako (Toraja)<sup>21</sup>.

Sejak penguasaan Bone atas Tana Toraja berlangsung pasang surut. Perlawanan rakyat dan pemimpin - pemimpin Toraja tetap berlangsung dan berjuang mempertahankan wilayahnya. Dengan konsep persatuan yang disebut "To pada Tindo Mesa' Pangngimpi" ( orang sama tidur sama cita - cita ), orang - orang Toraja menyerang perkampungan - perkampungan Arung Palakka, yang akhirnya menurut Tangdilintin tentara Arung Palakka meninggalkan Tana Toraja pada tahun 1680.

Hubungan Toraja dengan orang-orang Bugis selanjutnya berlangsung pada permulaan abad ke-19<sup>22</sup>. Sejak saat itu Toraja dibanjiri pedagang-pedagang yang datangnya dari Bugis (Bone dan Sidenreng) dengan membawa barang dagangan termasuk senjata api. Hubungan kedua ini, membawa perubahan dalam masyarakat Toraja, yakni terjadinya perang Saudara. Kondisi ini sebagai akibat dari penjualan senjata api secara bebas oleh para pedagang.

<sup>21</sup>Kamaruddin, dkk. Pengkajian (Transliterasi dan Terjemahan) Lontarak bilang Raja Gowa dan Tallok (naskah Makassar). (Ujung Pandang : Depdikbud Proyek Pengkajian dan Penelitian Kebudayaan Sul-Sel La Galigo. 1985/1986). hlm. 170.

<sup>22</sup>T. Tangdilintin. Op.cit. hlm. 66.

Ada satu hal yang cukup menarik, dalam catatan Tangdilintin disebutkan bahwa pada pertengahan abad ke-19 di Tana Toraja datang seorang Panglima Perang Bugis dari kerajaan Bone yang bernama Petta Ponggawae. Petta Ponggawae datang ke sana bersama seorang ahli perang dari Sidenreng bernama Wa' Situru' yang terkenal dengan sebutan "Andi Tunru". Kedatangan pemimpin-pemimpin perang Bugis tersebut, adalah dalam rangka perang kopi di Tana Toraja pada sekitar tahun 1889-1890. Perang ini terjadi antara pedagang-pedagang kopi dari Bugis Sidenreng dan Sawitto dengan pedagang-pedagang kopi dari Bugis Bone dan Luwu<sup>23</sup>.

Pada awal abad XX, Tana Toraja berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda dengan pasifikasi di Sulawesi Selatan mengalahkan Tana Toraja pada bulan Maret 1907, walaupun kedatangan Kolonial itu mendapat perlawanan yang sengit dari para pejuang - pejuang di Tana Toraja. Dalam catatan Tangdilintin dikatakan bahwa yang paling terakhir ditundukkan oleh tentara kolonial adalah seorang bangsawan Tana Toraja yang bernama Siambe Pong Tiku. Bahkan berjuang berbulan - bulan lamanya kemudian beliau tertangkap dalam pengepungan tentara Belanda pada suatu pertahanan beliau pada tanggal 30 Juni 1907. Selanjutnya beliau ditangkap dan ditawan di markas Belanda yang terdapat di Rantepao.

<sup>23</sup>Ibid. hlm. 67.

Pada tanggal 10 Juli 1907 Pong Tiku ditembak mati oleh tentara Belanda di pinggir sungai Saddang Kota Rantepao<sup>24</sup>. Sejak saat itu Pemerintahan Kolonial Belanda berjalan dengan menempatkan/membagi wilayah-wilayah Tana Toraja pada tiga daerah Onderafdeling yang masing-masing :

1. Onderafdeling Enrekang untuk bahagian selatan Tondok Lepongan Bulan.
2. Onderafdeling Mamasa untuk bahagian barat daerah Tondok Lepongan Bulan.
3. Onderafdeling Makale untuk bahagian utara dan sebagian timur Tondok Lepongan Bulan<sup>25</sup>.

#### C. Pengembangan Tanaman Komoditi Ekspor di Sulawesi Selatan

Berbicara tentang pengembangan komoditi ekspor di Sulawesi Selatan, tidak akan terlepas dari peranan Makassar sebagai sebuah Kerajaan Maritim. Makassar dengan kerajaan kembar Gowa dan Tallo dengan dukungan kondisi geografis pada daerah pantai, memungkinkan untuk mengadakan hubungan-hubungan keluar. Hubungan keluar ini, membawa makna yang tidak sedikit bagi rakyatnya. Terjadinya hubungan timbal balik antara negara-negara atau kerajaan lain lebih muda. Perdagangan timbal balik dengan sendirinya juga terjadi. Makassar dengan kerajaan kembar Gowa dan Tallo diperkirakan mulai berkembang pada masa

<sup>24</sup>Ibid. hlm. 70.

<sup>25</sup>Ibid. hlm. 70-71.

pemerintahan raja Gowa ke-9 Karaeng Tumapakrisi Kallonna (1510-1545)<sup>26</sup>. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Gowa giat memperluas pengaruh kekuasaannya, dengan melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Seperti Kerajaan Panji, Katingang, Siang, Suppa, Sidenreng, Lumbangang, Bulukumba dan Selayar. Perluasan kekuasaan ini masih terbatas, yang ditandai oleh pengembangan pertumbuhan bandar niaga masing-masing kerajaan taklukan itu. Kondisi ini dianggap oleh Gowa sebagai penghambat usaha pengembangan kegiatan niaganya. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Karaeng Tumi Pallangga Ulaweng (1546-1565), Kerajaan Gowa melaksanakan ekspansi penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan seperti : Siang, Bacukiki, Suppa, Sidenreng, Langkese, Polombangkeng, Lamuru, Soppeng, Lamatti, Wajo, Duri, Panaikang dan lain-lain. Raja ini memaksakan kerajaan-kerajaan yang ditakluhkannya untuk menyatakan ikrar "Hakkanama Nu Maamio" (aku bertitah dan kamu taati) dan mengangkut orang dan barang ke bandar niaganya<sup>27</sup>.

Dalam masa pemerintahan beliau dicatat, bahwa orang-orang asing mulai memasuki bandar niaga Makassar, Somba Opu. Pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu seperti Pahang,

---

<sup>26</sup>Edward L. Poelinggomang. *Op.cit.* hlm. 24.

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 26.



pemerintahan raja Gowa ke-9 Karaeng Tumapakrisi Kallonna (1510-1545)<sup>26</sup>. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Gowa giat memperluas pengaruh kekuasaannya, dengan melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Seperti Kerajaan Panji, Katingang, Siang, Suppa, Sidenreng, Lumbangang, Bulukumba dan Selayar. Perluasan kekuasaan ini masih terbatas, yang ditandai oleh pengembangan pertumbuhan bandar niaga masing-masing kerajaan taklukan itu. Kondisi ini dianggap oleh Gowa sebagai penghambat usaha pengembangan kegiatan niaganya. Oleh karena itu pada masa pemerintahan Karaeng Tuni Pallangga Ulaweng (1546-1565), Kerajaan Gowa melaksanakan ekspansi penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan seperti : Siang, Bacukiki, Suppa, Sidenreng, Langkese, Polombangkeng, Lamuru, Soppeng, Lamatti, Wajo, Duri, Panaikang dan lain-lain. Raja ini memaksakan kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya untuk menyatakan ikrar "Makkanama Nu Maanio" (aku bertitah dan kamu taati) dan mengangkut orang dan barang ke bandar niaganya<sup>27</sup>.

Dalam masa pemerintahan beliau dicatat, bahwa orang-orang asing mulai memasuki bandar niaga Makassar, Somba Opu. Pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu seperti Pahang,

---

<sup>26</sup>Edward L. Poelinggomang, *Op.cit.* hlm. 24.

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 28.

Patani, Canpa dan Minangkabau mengalihkan perhatian dan bahkan bermohon kepada raja untuk menetap di bandar niaganya.

Demikianlah seterusnya perkembangan Makassar sebagai bandar niaga semakin dikenal. Sampai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said (1639-1653) Kerajaan Gowa bahkan sudah menjalin hubungan dengan Gubernur Spanyol di Manila, Gubernur Portugal di Goa (India), penguasa Keling di Koromadel, Raja Inggris, Raja Kastalia (Spanyol), Raja Portugal dan Mufti di Mekkah<sup>28</sup>. Hubungan-hubungan ini memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang antara para pedagang. Kemungkinan itu juga terjadi pada tanaman komoditi kopi.

Kopi dalam catatan Bigalke dalam perjalanannya sampai di Nusantara, dikemukakan bahwa kopi yang tergolong dalam famili Rubiaceae awalnya berkembang di Ethiopia. Selanjutnya pada awal abad ke-17, kopi disuplai ke Arab. Pada tahun 1652 kopi telah menjadi kebutuhan rumah tangga di Inggris, Eropa dan Amerika<sup>29</sup>. Pada tahun 1658 memasuki Canglon dan tahun 1689 kopi arabica masuk di daerah Jawa melalui Malabar. Sejak saat itu, pengembangan tanaman kopi memasuki wilayah Sumatera dan Sulawesi<sup>30</sup>.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 36.

<sup>29</sup>Bigalke, *Op.cit.* hlm. 29.

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 30.

Patani, Campa dan Minangkabau mengalihkan perhatian dan bahkan bermohon kepada raja untuk menetap di bandar niaganya.

Demikianlah seterusnya perkembangan Makassar sebagai bandar niaga semakin dikenal. Sampai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said (1639-1653) Kerajaan Gowa bahkan sudah menjalin hubungan dengan Gubernur Spanyol di Manila, Gubernur Portugal di Goa (India), penguasa Keling di Koromadel, Raja Inggris, Raja Kastalia (Spanyol), Raja Portugal dan Mufti di Mekkah<sup>28</sup>. Hubungan-hubungan ini memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang antara para pedagang. Kemungkinan itu juga terjadi pada tanaman komoditi kopi.

Kopi dalam catatan Bigalke dalam perjalanannya sampai di Nusantara, dikemukakan bahwa kopi yang tergolong dalam famili Rubiaceae awalnya berkembang di Ethiopia. Selanjutnya pada awal abad ke-17, kopi disuplai ke Arab. Pada tahun 1652 kopi telah menjadi kebutuhan rumah tangga di Inggris, Eropa dan Amerika<sup>29</sup>. Pada tahun 1658 memasuki Canglon dan tahun 1689 kopi arabica masuk di daerah Jawa melalui Malabar. Sejak saat itu, pengembangan tanaman kopi memasuki wilayah Sumatera dan Sulawesi<sup>30</sup>.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 36.

<sup>29</sup>Bigalke. *Op.cit.* hlm. 29.

<sup>30</sup>Ibid. hlm. 30.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut di atas, menunjukkan bahwa datangnya kopi di Nusantara dan Sulawesi khususnya bersamaan dengan upaya pengembangan Makassar sebagai bandar niaga. Tanaman kopi yang sebelumnya telah menjadi primadona di negara-negara lain seperti Inggris, Eropa dan Amerika tersebut, dengan sendirinya akan menjadi komoditi dagang yang mempunyai prospek. Dengan dasar ini, dengan sendirinya upaya pengembangan tanaman komoditi ini oleh masyarakat atau rakyat kerajaan Gowa dan daerah taklukannya cukup diperhatikan.

Perkembangan Makassar sebagai bandar niaga yang cukup besar, berkembang sampai Makassar sendiri dibawah penguasaan VOC. Bandar niaga Makassar Somba Opu menjadi bandar transit dari bandar-bandar niaga dari kerajaan-kerajaan kecil, yakni ditandatanganinya pembaharuan perjanjian Bongaya 1824<sup>31</sup>. Pemerintahan Belanda mulai menanam strategi di Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Dengan dasar ini, sehingga pada tahun 1847 Gubernur Sulawesi Pierre J.B. Perez (1841-1849) mengumumkan pelaksanaan kebijaksanaan pelabuhan bebas. Hal ini dilakukan sebagai suatu langkah memajukan perniagaan di Makassar yang sejak diduduki VOC hingga tahun 1846 mengalami kesunyian. Kesunyian diakibatkan oleh banyaknya

<sup>31</sup>Mattulada. Menyelusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1300-1700). Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1984. hlm. 71.

perahu-perahu yang berlayar di bandar niaga di luar wilayah pelabuhan. Pelaksanaan kebijaksanaan pelabuhan bebas tersebut dapat dikatakan berhasil, karena sejak saat itu tercatat 52 kapal Eropa dan 1578 perahu Bumiputera yang melakukan bongkar muat barang dagang di Pelabuhan Makassar<sup>32</sup>.

Pelaksanaan kebijaksanaan pelabuhan bebas di bandar niaga Makassar, selanjutnya diikuti oleh beberapa usaha-usaha ke arah pengembangan Makassar sebagai pelabuhan transito. Salah satu diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan hasil produksi tanaman komoditi termasuk tanaman kopi.

Dalam kajian Edward L. Poelinggomang dikatakan bahwa disamping pelaksanaan pelabuhan bebas dan menjamin keamanan pelayaran niaga, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan dan mengembangkan tanaman dagang seperti : kopi, tebu, kapas, kelapa dan coklat. Sebagai contoh adalah tanaman kopi. Sebelumnya kopi hanya dijumpai di daerah Bantaeng yang diperkenalkan dan diusahakan oleh pedagang Arab dan diusahakan oleh Raja Gowa<sup>33</sup>. Pada tahun 1860 pemerintah meningkatkan bibit kopi dan mendorong penduduk untuk mengusahakannya di daerah pegunungan. Bahkan melalui tanaman tersebut penduduk dipungut pajak

<sup>32</sup>Edward L. Poelinggomang. *Op.cit.* hlm. 81.

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 84.

setelah tanamannya berhasil. Dikemukakan bahwa dalam pengembangan selanjutnya untuk mendorong peningkatannya, pihak pemerintah mewajibkan pembayaran pajak tahunan dalam bentuk uang dan kopi (F1 3,- dan 12 kati kopi) bagi setiap keluarga. Selain daerah itu, pemerintah mengusahakan juga di wilayah Kerajaan Bone seusa penaklukannya (1868) dan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Sidenreng dan Toraja<sup>34</sup>.

#### D. Toraja dan Kopinya

Pada pembahasan terdahulu, telah dikemukakan bahwa Tana Toraja sejak abad ke-15 telah mengadakan hubungan dengan daerah-daerah luar. Hubungan tersebut ada beberapa bentuk. Bentuk hubungan itu adalah hubungan perdagangan, penguasaan dan peperangan dan hubungan-hubungan bilateral. Hubungan dalam bentuk perdagangan, seperti kedatangan para saudagar Jawa dan Hindu pada awal abad ke-15. Demikian juga hubungan dagang yang dilakukan dengan pedagang-pedagang Bugis pada sekitar abad ke-17. Hubungan dalam bentuk penguasaan dan peperangan, terlihat pada hubungan yang dilakukan dengan kerajaan Bone dan kerajaan Gowa. Dalam catatan harian raja-raja Gowa dan Tallo, sejak tahun 1632 tercatat penyerangan kerajaan Gowa ke Tana Toraja. Disebutkan pada tanggal 22 Oktober 1632 raja berlayar ke Toraja, selanjutnya pada tanggal 13 September 1632 raja

---

<sup>34</sup>Ibid. hlm. 84.



kembali dari Toraja setelah menaklukkan Bolong<sup>35</sup>. Selanjutnya penguasaan yang dilakukan oleh kerajaan Bone dibawah pemerintahan Arung Palakka terjadi pada tahun 1675 yang dikenal dengan "Kasaeanna To Bone".

Hubungan yang dilakukan oleh orang-orang Toraja dengan orang luar wilayahnya, memberikan kemungkinan untuk menjalin hubungan dan sekaligus akan terjadi pertukaran barang dan kebutuhan mereka. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk terjadinya perdagangan dan pengenalan jenis-jenis tanaman yang masa itu menjadi tanaman komoditi seperti kopi.

Tanaman kopi seperti yang dikemukakan oleh Edward L. Poelinggomang merupakan salah satu hasil dari hubungan masyarakat Tana Toraja dengan daerah-daerah diluarnya.

Sumber lain tentang kopi di Tana Toraja, juga disinggung oleh T. Bigalke dalam kajiannya tentang A Social History of Tana Toraja, yang mengatakan sejak tahun 1830 hasil kopi yang ada di wilayah Sulawesi Selatan telah mulai dikenal dengan kualitas yang tidak kalah dari produksi kopi yang ada di Sumatera dan Manado. Kopi yang dimaksud adalah kopi yang dihasilkan di wilayah Duri yang dikenal dengan istilah kopi "Bungi"<sup>36</sup>. Duri, merupakan salah satu wilayah pegunungan sebelah selatan Tana Toraja

<sup>35</sup>Kamaruddin, dkk. *Op.cit.* hlm. 93-94.

<sup>36</sup>T. Bigalke, *Op.cit.* hlm. 30.

yang langsung dikembangkan oleh jejeran gunung dan aliran sungai Saddang. Dengan kondisi wilayah yang hampir sama yang langsung berbatasan dengan sendirinya akan lebih memudahkan pengembangan tanaman ini melalui para petani. Disamping itu, hubungan laut yang dilakukan oleh orang-orang Bugis-Makassar melalui Teluk Bone sampai ke pantai utara Palopo, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk pengembangan tanaman kopi di wilayah Tana Toraja.

Ada beberapa faktor yang mendukung tanaman ini dapat berkembang dengan cepat di Tana Toraja. Faktor pertama dan utama, adalah keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan tanaman komoditi ekspor termasuk kopi. Latar belakang ini mengakibatkan upaya pengembangan tanaman komoditi ekspor ini diusahakan dengan baik, baik dilakukan melalui jalan pemerintahan maupun dilakukan melalui para pedagang. Salah satu contoh upaya atau keterlibatan pemerintah Hindia Belanda, yakni dengan mengadakan impor bibit kopi pada tahun 1860. Melalui jalan ini pemerintah, melalui pemerintah lokal (para raja), menganjurkan kepada penduduk untuk mengusahakan penanaman kopi.

Sarana pengembangan kopi ini, juga mungkin dilakukan melalui para pedagang untuk memperkenalkan dan menjadikannya sebagai barang dagangan yang dibawa ke daerah - daerah produksi. Berdasarkan letak geografis Tana Toraja, yakni daerah - daerah pegunungan, merupakan fakta pendukung yang lainnya. Dengan demikian pengembangan



tanaman kopi di wilayah ini akan lebih baik. Dalam catatan T. Bigalke, dikatakan tanaman kopi dapat dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian 800 - 1.000 meter di atas permukaan laut<sup>37</sup>.

Dengan faktor-faktor politik perdagangan dan kondisi alam tersebut di atas, perkembangan tanaman kopi di Tana Toraja sejak paroh kedua abad ke-19, menunjukkan kemajuan. Kemajuan berupa penyebaran tanaman kopi di wilayah Tana Toraja, terlihat pada penanaman di wilayah Tana Toraja mulai bagian selatan sampai pada bagian utara wilayah-wilayah pegunungannya dikenal seperti Pangngala, Rantepao dan wilayah-wilayah Sinbuang.

Peningkatan hasil-hasil produksi kopi di Tana Toraja mulai berkembang dengan baik pada paroh kedua abad ke-19. Dalam laporan Braam Morris, walaupun dikatakan bahwa tanaman kopi bagi masyarakat Tana Toraja hanyalah merupakan tanaman sekunder, namun menonjolkan perkembangan yang baik. Braam Morris melaporkan bahwa :

" Pertanian di Luhu (Luwu) dilakukan oleh orang-orang Toraja. Orang-orang Toraja ini hanya menanam padi, jagung, dan berbagai tanaman kedua yaitu kopi dan tembakau. Khususnya penanaman kopi dari tahun ke tahun meningkat, ditandai dengan meningkatnya jumlah yang diekspor melalui Luwu. Walaupun sebenarnya penanaman kopi baru dalam tahap permulaan<sup>38</sup> ".

<sup>37</sup>Ibid. hlm. 34.

<sup>38</sup>Braam Morris, *Op.cit.* hlm. 13. Braam Morris adalah Gubernur Celebes pada tahun 1888. Ibid. hlm. 5.

Walaupun menurut beliau, pengurusan pertanian atau penanaman kopi oleh masyarakat Tana Toraja tidak dilakukan atau tidak diurus seperti tanaman padi dan jagung, akan tetapi tanaman ini ditanam bersamaan dengan pohon-pohon kecil yang selanjutnya pemeliharaannya diserahkan pada alam. Dikatakan penyaluran kopi melalui Luwu untuk kurun waktu paroh kedua abad ke-19 (tidak disebut dengan jelas tahunnya) mencapai 6.000 pikul pertahun<sup>39</sup>.

Ada catatan yang cukup penting mengenai kopi dari Tana Toraja seperti dikemukakan oleh Braam Morris. Mengenai mutu kopi yang ada di Tana Toraja (diusahakan oleh petani Toraja), mempunyai kualitas bagus. Kopi di Luwu yang diusahakan oleh orang-orang Toraja masak di batangnya, buahnya merah baru dipetik, sehingga menghasilkan kualitas yang bagus. Orang-orang Toraja tidak mengikuti pengaruh pembeli-pembeli asing, dengan membasahi kopi sebelum dibawa ke pasar agar timbangannya meningkat<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Barang-barang yang dilaporkan oleh Braam Morris penyaluran saja ditaksir ± 15.000 pikul, rotan 10.000 pikul dan kopi 6.000 pikul pertahun. Tentang lilin, teripang, kulit dan lain-lain barang bahkan dengan kira-kira tidak diketahui. *Ibid.* hlm. 18.

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 13.

## BAB III

## PERDAGANGAN KOPI DI TANA TORAJA

A. Pola Perdagangan

Paruh kedua abad ke-19 Tana Toraja menjadi salah satu penghasil kopi yang cukup besar di wilayah Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1861 tercatat produksi kopi Tana Toraja sebanyak ± 6.000 pikul pertahun. Hasil seperti ini merupakan hasil yang cukup besar untuk suatu daerah penghasil komoditi pada waktu itu.

Dalam catatan Braam Morris, perdagangan di daerah ini pada umumnya dilakukan dengan sistem barter, kecuali kopi sekali timbang dan dibeli dengan uang tunai<sup>1</sup>. Perdagangan di Tana Toraja, dilakukan melalui dua jalur yakni pedagang masuk dari arah selatan melalui dua jalur yakni pedagang masuk dari arah selatan melalui Sidenreng memasuki daerah Duri yang terkenal dengan kopinya yakni kopi Kalosi<sup>2</sup>. Jalur ini merupakan jalan darat, kecuali kalau mengikuti jalur Sungai Saddang, jalur kedua yakni melalui pelabuhan Palopo, menyusuri Selat Makassar atau Teluk Bone menuju pantai Palopo. Para pedagang Bugis Makassar utamanya pedagang-pedagang yang datang dari Bone melalui jalan laut ini. Pertemuan kedua jalur perdagangan

---

<sup>1</sup>Braam Morris. *Op.cit.* hlm. 18.

<sup>2</sup>Mengenai jalur perdagangan ini dan kopi kalosi, lihat Bigalke. *Op.cit.* hlm. 35.

seperti ini, dengan sendirinya akan menimbulkan sarana perdagangan untuk jual beli (bentuk barter), berupa pasar.

Sebagai bahan banding, menurut laporan Braam Morris dapat diambil gambaran :

"Perdagangan di Luwu (Palopo) adalah hal yang penting Alam yang demikian tidak dapat diingkari kecilnya peranan penduduk pribumi, karena seluruh perdagangan ada di tangan orang Arab, orang China, orang Makassar dan Bugis, yang datang dan tinggal untuk sementara tetapi memperoleh kekayaan yang luar biasa dari hasil hutan dan produksi yang terus meningkat. Setiap tahun secara teratur datang di Kota Palopo beberapa kapal dari Singapura, Pontianak, Wajo, dan muara dari kali Cerazana (Pallima) serta dari Makassar untuk mengambil produksi<sup>3</sup>."

Para pedagang yang disebutkan di atas, datang melalui laut dengan pusat perdagangan di Palopo. Barang dagangan yang dibeli di pegunungan dibawa ke Palopo untuk dijual kepada pedagang yang datang dari luar seperti Bone, Makassar, Wajo dan lain-lain. Tahun 1886 dilaporkan bahwa kapal-kapal yang masuk di pantai Palopo, terus meningkat yakni sampai dua belas buah, diantaranya dua perahu besar (kapal berlayar) bertiang tiga, sedangkan tahun sebelumnya tujuh atau delapan buah<sup>4</sup>. Munculnya Palopo sebagai tempat berlabuhnya para pedagang khususnya pedagang yang melalui laut dengan sendirinya para petani sebahagian akan membawa hasil-hasil pertaniannya ke tempat tersebut.

<sup>3</sup>Braam Morris, *Op.cit.*, hlm.16. bandingkan dengan peta jalur perdagangan di Tana Toraja Bigsike hlm. 35.

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 17.

Perdagangan laut ini, biasanya dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juli atau Agustus. Perahu yang datang, pulang membawa muatan seperti sagu, rotan, kopi, lilin, kulit dan kayu nibong untuk perdagangan ke Singapura.

Adapun barang-barang yang dapat diperoleh di Tana Toraja adalah barang-barang dagangan seperti hasil-hasil hutan, menganyam bakul-bakul rotan halus dan kasar, topi dari bambu, dan dos-dos dari bambu, tempat tembakau dan sirih, berbagai macam kopiah, tikar, kantong-kantong kopi, membuat tikar-tikar rotan kasar, keranjang tangan, mengukir besi dan emas, menempah keris dan badik, kelewang dan tombak, ido beralun untuk sumpitan, mengeringkan kulit dan lain-lain<sup>5</sup>. Barang-barang tersebut oleh orang Toraja ditukar dengan garam, kain kasar, kain tenun, tembikar dan barang-barang tembaga dengan orang-orang pantai.

Barang-barang yang dimasukkan, khususnya para pedagang yang melalui jalur laut dan bandar di Palopo, antara lain ; garam, beras, ikan kering, candu, bedil, mesin, dan timah (hasil dari timah diselundupkan), kapak dan parang, benang Eropa, kain tenun, sutra, jambang tanah dan jambang batu, piring, barang-barang tembaga, dan barang-barang kelontong. Khususnya barang-barang yang di ekspor ke Singapura ialah sagu, rotan, kopi, lilin, kulit. Barang-barang dagangan yang dibawa ke Makassar dan daerah-

<sup>5</sup>Ibid. hlm. 15.

daerah pantai lainnya antara lain ; kayu nibong, kopi, damar, rotan, sagu, lilin, teripang, punga, umbi, bingkuru, kaleleng dan daun rumbia, tikar, annamuri, bakul-bakul, kotak-kotak, kelewang dan badik-badik<sup>6</sup>.

Melihat barang-barang dagangan yang diperoleh melalui jalur laut, yakni di pantai Palopo, terlihat bahwa para pedagang baik dari Singapura, Makassar, Bugis seperti Bone dan Wajo serta pedagang-pedagang yang datang dari Mandar, semuanya membutuhkan kopi. Dengan kondisi ini orang-orang Toraja mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk mengadakan penjualan hasil-hasil pertaniannya utamanya kopi apalagi bahwa perdagangan tersebut didukung oleh beberapa pasar.

Pasar-pasar yang terkenal di Tana Toraja pada tahun 1890, antara lain pasar Rantebua, Rantepao, dan pasar Kalambe<sup>7</sup>. Dalam tulisan Bigalke dikatakan bahwa adapun uang yang dipergunakan di Tana Toraja dalam mengadakan jual beli, adalah uang koin duit namak (Chichen money)<sup>8</sup>. Pasar-pasar yang disebutkan di atas, merupakan pasar yang dianggap cukup ramai sejak 1890 sampai pada awal abad XX.

Pasar-pasar yang ada di Tana Toraja, bergilir setiap enam hari sekali untuk satu pasar. Karena itu pasar-pasar tersebut tidak tetap waktunya, karena harus disesuaikan

<sup>6</sup>Ibid. hlm. 17.

<sup>7</sup>Bigalke. *Op.cit.* hlm. 36.

<sup>8</sup>Ibid. hlm. 38.

dengan perhitungan tersebut. Mengenai jumlah hari untuk setiap pasar, dijelaskan oleh Tangdilintin bahwa pasar (pasa') di Tana Toraja adalah untuk mengadakan jual beli bagi masyarakat, juga sebagai kalender yang perhitungannya berselang - selang enam hari. Perhitungan itu disesuaikan dengan peredaran bulan langit, oleh masyarakat Toraja dianggap sebagai pedoman dalam mempergunakan waktu dan hari untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Jadi pasar (pasa') di Tana Toraja adalah sebagai penanggalan hidup (kalender) yang dapat berubah-ubah<sup>9</sup>. Mengenai pajak kopi untuk kurun waktu ini, tidak ada sumber tentang pajak di Tana Toraja maupun di Luwu. Hanya dicatat oleh Braam Morris bahwa semua barang yang masuk dan keluar di Palopo tunduk kepada peraturan. Tarif tertentu tidak terdapat untuk itu, hanya biasanya muatan dari setiap perahu ditaksir, sesudah itu baru diatur tentang kewajiban yang harus dibayar<sup>10</sup>. Namun demikian mengenai pajak perdagangan yang dianggap oleh Braam Morris sebagai suatu aturan, adalah peraturan pajak pelayaran dan perdagangan yang dituangkan dalam "Lembaran Negara Hindia Belanda" (Staatsblad van Nederlandsch Indie) tahun 1873 No. 35<sup>11</sup>.

<sup>9</sup>Tangdilintin. *Op.cit.* hlm. 274.

<sup>10</sup>Braam Morris. *Op.cit.* hlm. 19.

<sup>11</sup>Edward L. Poelinggomang. *Op.cit.* hlm. 86  
(catatan kaki).

Jalur kedua perdagangan di Tana Toraja, yakni melalui darat dari Sidenreng, Enrekang, Duri dan memasuki wilayah Tana Toraja<sup>12</sup>. Jalur ini dipergunakan oleh orang-orang atau pedagang-pedagang yang datangnya dari arah selatan Tana Toraja, seperti Sidenreng, Mandar, dan pedagang-pedagang yang datangnya dari Pare-Pare. Melalui jalur ini, kelihatannya hubungan lebih berat karena kondisi sarana perhubungan yang sulit. Kondisi ini memungkinkan peranan para pesiar dan para pedagang semakin besar dalam mengadakan jual beli.

Pada penjelasan terdahulu, telah dikemukakan bahwa hubungan pertama orang / penduduk Tana Toraja, yakni datangnya dari sebelah selatan Tana Toraja. Hubungan-hubungan yang terjalin seperti dengan perdagangan dari Toraja. Hubungan-hubungan yang terjalin seperti dengan pedagang dari Sidenreng, Pare-Pare dan Mandar, selanjutnya diikuti oleh para pedagang yang berada di wilayah itu, utamanya Pare-Pare, seperti pedagang-pedagang China, Arab dan lain-lain. Tambahan dalam kurun waktu 1847-1888, dimana pembukaan pelabuhan bebas di pelabuhan Makassar<sup>13</sup>, yang selanjutnya diikuti oleh pelabuhan-pelabuhan kecil

<sup>12</sup>Mengenai jalur ini, lihat T. Bigalke hlm. (peta) jalur perdagangan di Tana Toraja, lihat juga T. Bigalke hlm. 342 (peta) perdagangan budak di Tana Toraja

<sup>13</sup>penjelasan tentang pelabuhan bebas dikaji dengan lengkap oleh Edward L. Poelinggomang, dalam preteksi dan perdagangan bebas. *Op.cit.* hlm. 165.



lainnya, termasuk Pare-Pare<sup>14</sup>. Penempatan pelabuhan Pare-Pare sebagai salah satu pelabuhan kecil dalam status pelabuhan bebas, memungkinkan para pedagang untuk mengadakan ekspor langsung barang-barang dagangan ke luar negeri. Singapura sebagai salah satu contoh pelabuhan yang dianggap saingan pelabuhan Makassar kurun waktu ini menjadi sasaran ekspor utamanya barang-barang komoditi ekspor seperti kopi.

Penetapan Pare-Pare dan Sidenreng sebagai bagian dari wilayah yang termasuk dalam kebijaksanaan perdagangan ini, memungkinkan jalan-jalan perdagangan ke Tana Toraja dan Duri (sebagai penghasil kopi) pada kurun waktu ini cukup besar, menjadi sasaran para pedagang. Posisi pasar sebagai sarana jual beli semakin berkembang. Dalam catatan T. Bigalke dikatakan ada beberapa pasar terkenal untuk wilayah selatan Tana Toraja, yakni Kalosi (masuk dalam wilayah Enrekang), Raho (wilayah Tana Toraja) dan Pangngala<sup>15</sup>. Pasar-pasar inilah tempat jual beli antara para petani dan pedagang.

Pertemuan dan jalan perdagangan kopi di Tana Toraja untuk kurun waktu 1860-1906 ini mengakibatkan munculnya persaingan ketat antara para pedagang yang datang dari timur Tana Toraja dengan pedagang-pedagang dari Luwu.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 98.

<sup>15</sup>T. Bigalke, 1933. *Op.cit.*, hlm. 343.

Bone, Wajo dan Makassar, dan pedagang-pedagang yang datang dari arah selatan Tana Toraja, yakni pedagang-pedagang yang berasal dari Sidenreng, Pare-Pare dan Mandar serta Enrekang sendiri. Latar belakang ini mengakibatkan munculnya perang kopi 1888-1889 (akan dijelaskan pada bab yang lain).

#### B. Jaringan Perdagangan

Kesulitan pertama pembicaraan mengenai jaringan perdagangan kopi di Tana Toraja khususnya untuk kurun waktu 1860-1910, adalah karena kurangnya sumber tentang besarnya, banyaknya kopi yang keluar dari wilayah tersebut. Pembicaraan mengenai hal ini, hanya disinggung oleh Braam Morris, dengan memperkirakan jumlah kopi yang keluar dari Tana Toraja (melalui Luwu) untuk tahun 1890 ± 6.000 pikul. Taksiran ini juga sudah termasuk hasil-hasil kopi dari wilayah yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Luwu, seperti daerah-daerah Seko, Rongkong, Saling, Wotu, Baran, Sarompong dan lain-lain<sup>16</sup>. Demikian juga halnya mengenai besarnya jumlah kopi yang berasal dari Tana Toraja yang keluar melalui pedagang-pedagang yang datangnya dari daerah selatan, seperti dari Sidenreng, Pare-pare dan Mandar.

Kesulitan lain yakni tidak adanya data tentang jumlah kopi yang dibeli oleh setiap pedagang yang melalui jalur

<sup>16</sup>Braam Morris, *Op.cit.*, hlm. 18.

timur Palopo maupun yang melalui jalur selatan Pare-Pare. Apalagi dengan kompleksnya para pedagang yang datang seperti pedagang Cina, Arab, dan Bugis-Makassar. Tambahan, perubahan status pelabuhan Makassar dan pelabuhan-pelabuhan kecil di Sulawesi Selatan sebagai pelabuhan bebas, mengakibatkan sulitnya penentuan jumlah dan jaringan atau ke arah mana hasil komoditi itu di ekspor oleh para pedagang.

Namun demikian penulis akan melihat perbandingan-perbandingan tersebut melalui jaringan perdagangan Palopo, Pare-Pare dan pelabuhan Makassar sendiri. Demikian juga jaringan dagang yang dilakukan oleh para pedagang, akan dilihat pada tiga pelabuhan transit tersebut.

Jaringan perdagangan melalui Palopo, seperti yang dilaporkan oleh Braam Morris, dikatakan bahwa : Perdagangan di Luwu adalah hal yang penting. Namun demikian tidak dapat diingkari kecilnya peranan penduduk pribumi. Menurut beliau, perdagangan di Luwu seluruhnya berada di tangan orang-orang Arab, Cina, Makassar dan Bugis<sup>17</sup>. Selanjutnya dilaporkan oleh Braam Morris, bahwa dalam tahun 1860-an setiap tahun secara teratur datang di kota Palopo beberapa kapal dari Singapura, Pontianak, Wajo, dan muara dari kali Cererana (Pallima) serta dari Makassar untuk mengambil produksi. Jumlah kapal-kapal, ini

<sup>17</sup>Ibid. hlm. 18.

meningkat dalam tahun 1866 menjadi dua belas diantaranya dua kapal besar bertiang tiga dan sebelumnya hanya tujuh atau delapan buah kapal<sup>18</sup>.

Berdasarkan laporan tersebut di atas, terlihat bahwa jaringan perdagangan melalui Palopo untuk kurun waktu ini hanya terjadi ekspor ke Singapura saja (bukan dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda), sedangkan yang lainnya perdagangan itu terjadi dengan orang-orang pribumi. Mengenai barang - barang yang di ekspor ke Singapura pada kurun waktu 1860-an ini, juga ditulis oleh Braam Morris, yang mengatakan bahwa pada bulan Juli dan bulan Agustus para pedagang datang dan membeli dengan membawa bermacam-macam barang seperti rotan, Sago, kopi, lilin, kulit dan kayu nibong ke Singapura. Sedangkan orang-orang yang dibawa ke daerah-daerah Makassar, Bone dan Mandar (Balangnipa) seperti Sago, rotan, damar dan lain-lain.

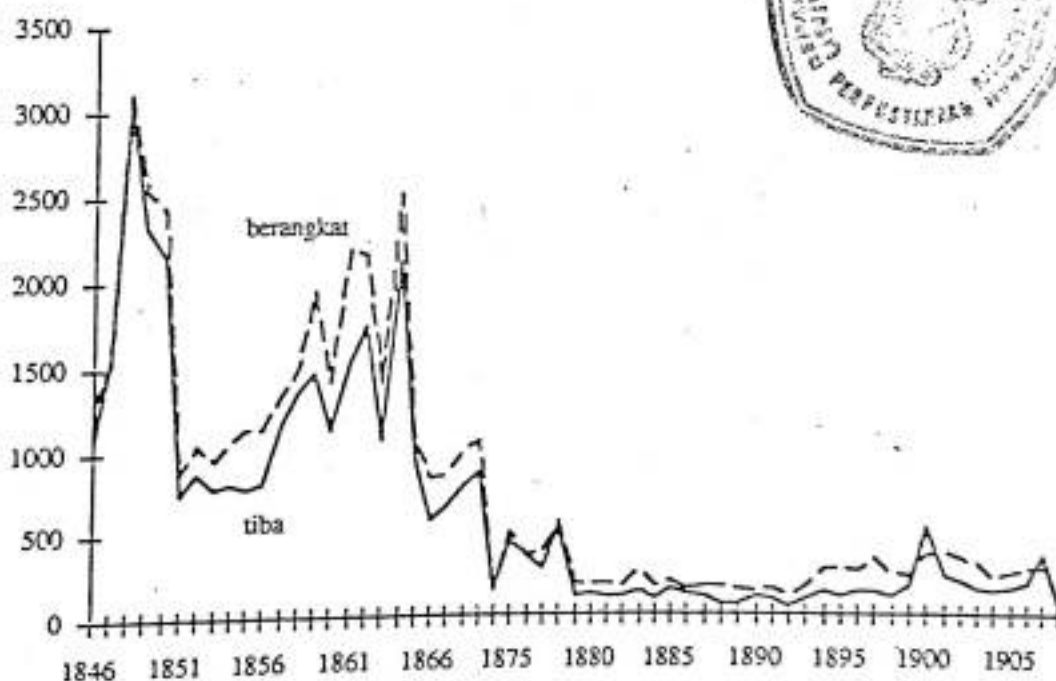
Terlihat jelas bahwa jenis-jenis barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang, baik oleh pedagang yang ke Singapura maupun pedagang-pedagang yang datangnya dari Bugis, Makassar, dan Mandar, dimana terlihat kopi tidak lagi melalui pelabuhan Makassar. Perdagangan itu merupakan perdagangan langsung ke Singapura, sehingga jaringan perdagangan itu dapat dianggap sebagai jaringan yang

<sup>18</sup>Ibid. hlm. 18

langsung. Hal ini diakibatkan oleh adanya penerapan pelabuhan bebas untuk wilayah Sulawesi Selatan pada pelabuhan Makassar dan pelabuhan-pelabuhan di daerah taklukannya termasuk Palopo.

Sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat pada pelayaran niaga penduduk (bumi putera) pada kurun waktu 1846-1908.

Lalu-Lintas Perahu Dagang Bumiputra  
Makassar 1846-1908<sup>19</sup>



<sup>19</sup>Sumber: Edward L. Poelinggema, *Op.cit.*, hlm.106

Pada awal tampak kunjungan perahu Bumi Putera meningkat pesat: pada tahun pertama (1847) jumlah yang datang adalah 1559 perahu dan berangkat adalah 1525. Dari jumlah itu yang datang dari wilayah pemerintahan langsung dan yang berangkat adalah 1122 perahu dan 78 perahu besar pada 1847. Pada tahun berikutnya tiba 2858 dan 15 perahu besar sementara yang berangkat 2796 dan 21 perahu besar<sup>20</sup>.

Dalam kajian Edward L. Poelinggomang, dikatakan bahwa dalam kurun waktu ini terjadi penurunan kunjungan perahu dagang kerajaan Bumi Putera, karena tiga faktor. Pertama; berkaitan dengan pertentangan politik antara pemerintah dan Kerajaan Bone pada tahun 1848, sehubungan dengan perubahan gelar Gubernur. Perubahan itu dianggap Kerajaan Bone sebagai pernyataan bahwa Kerajaan Bone masuk dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Kedua; adalah pelaksanaan pelabuhan bebas bagi pelabuhan lain di wilayah pelayaran niaga penduduk, sebagai penduduk terikat juga memasukkan komoditi mereka ke pelabuhan-pelabuhan itu. Ketiga; yaitu perluasan pelayaran niaga pedagang Bugis dan China yang berpusat di Singapura ke wilayah di sebelah timur pelabuhan bebas lainnya<sup>21</sup>.

Apabila dilihat perbandingan pelayaran perahu niaga Makassar dalam kurun waktu di atas, dan jumlah perahu yang

<sup>20</sup>Ibid. hlm. 110.

<sup>21</sup>Ibid. hlm. 111.

datang di pelabuhan Palopo sebanyak  $\pm$  12 buah kapal untuk tahun 1860 dan jumlah pelayaran perahu niaga di Makassar sekitar 1500 lebih kapal (lihat grafik). Lain lagi jumlah perahu niaga yang datang dari Pare-Pare, yang membawa hasil komoditi dari Tana Toraja melalui Sidenreng (tidak diketahui jumlah yang pasti). Jumlah perahu untuk barang dagangan termasuk kopi tersebut, walaupun tidak ada data yang jelas tentang jumlahnya namun tetap merupakan bahagian dari komoditi yang sangat penting untuk kurun waktu ini (lihat jumlah produksi kopi Tana Toraja hlm. 34 tulisan ini).

Mengenai jalur pelayaran di wilayah eksport dari Toraja, dalam tahun 1891-1894 terlihat adanya pelayaran langsung dari Palopo dan Pare-Pare. Bandingkan dengan pelayaran yang dilakukan oleh KPM<sup>22</sup>.

Jalur Pelayaran KPM  
1895



<sup>22</sup> ibid. hlm. 139.

Dalam kajian Edward dikaitkan dalam kurun waktu 1885 kapal niaga perusahaan Inggris dan Cina di Singapura, khususnya kapal layar dan kapal kecil, sering melakukan pelayaran pesisir dengan menggunakan bendera Belanda sehingga memudahkan pelayaran seperti yang berlaku bagi KPM. Disebutkan sebagai contoh beliau menunjuk Kapal Tidar milik orang Arab yang menetap di Singapura yang secara periodik (setiap triwulan) mengunjungi pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Palopo dan Donggala<sup>23</sup>.

Berdasarkan jalur-jalur perdagangan dan pelayaran kapal-kapal niaga di Makassar dan pelayaran langsung yang dilakukan di Palopo dan Pare-Pare sebagai pelabuhan transit barang-barang komoditi yang berasal dari Tana Toraja, menunjukkan jalur perdagangannya :

- Jalur perdagangan langsung dari Palopo dan Pare-Pare ke daerah-daerah eksport seperti Singapura dan Malaka (lihat jalur pada peta pelayaran).
- Jalur perdagangan melalui pelabuhan transit Palopo dan Pare-Pare, melalui Makassar dan kemudian ke daerah eksport seperti Singapura dan Malaka, khususnya untuk pelayaran niaga dari Palopo kelihatannya juga melalui pelabuhan Bone Bajoe kemudian ke Makassar, sebagai pelabuhan transit terbesar dibawah penguasaan Hindia Belanda.

<sup>23</sup>Ibid. hlm. 137.



Hubungan ini lebih dipererat dengan mengadakan politik perkawinan. Perkawinan ini dilakukan dengan seorang keturunan Raja (Datu) Luwu. Perkawinan ini merupakan perkawinan politik untuk memperoleh kesuksesan dalam perdagangan. Setelah perkawinan itu Kerajaan Luwu dibawah kekuasaan Bone<sup>24</sup>. Hubungan Said Ali dengan penguasa di Kerajaan Luwu yang diikat dengan perkawinan dan hubungan Kerajaan Luwu dengan Bone, khususnya perdagangan, memberikan kekuatan tersendiri pada Said Ali sebagai seorang pedagang. Kondisi ini memberikan keuntungan pada Said Ali dalam mengadakan perdagangan. Bahkan kondisi ini dikatakan sebagai suatu kesempatan bagi Said Ali untuk mengumpulkan hasil-hasil pertanian, utamanya tanaman kopi. Dengan demikian secara politis Said Ali telah mempunyai kekuatan, dengan hubungan kekeluargaan dengan Raja Luwu dan hubungannya dengan Kerajaan Bone.

Sisi lain pedagang yang berasal dari Pare-Pare, dalam perjalanan dagangnya, juga menjalin hubungan dengan kerajaan dan penguasa-penguasa yang dilewati (menjadi jaminan keamanannya). Upaya ini dilakukan oleh Puang Palauwaim untuk menjamin keamanannya dalam perjalanan dagangnya. Untuk hal ini beliau mengadakan hubungan dengan Kerajaan Maiwa, Enrekang dan kerajaan-kerajaan yang ada di perbatasan Tana Toraja yakni Duri.

<sup>24</sup> *ibid.* hlm. 46.

Berdasarkan jaringan-jaringan dagang di atas, maka jalur dagang kopi dari Tana Toraja, akhirnya melalui dengan jalur dagang yang semua yang ada di Makassar.

### C. Perang Kopi Sebab dan Akibatnya

Perang kopi di Tana Toraja, terjadi pada tahun 1898<sup>25</sup> Perang ini terjadi sebagai akibat langsung dari persaingan para pedagang kopi di Tana Toraja.

Dalam perdagangan kopi di Tana Toraja, terkenal beberapa pedagang besar dari masing-masing jalur perdagangan, misalnya pedagang dari Pare-Pare dikenal "Puanna Paluwai" sedangkan dari Palopo terkenal Syekh Ali (Said Ali)<sup>26</sup>. Para pedagang tersebut baik yang datang dari arah selatan (darat), maupun yang datang dari arah timur (pelabuhan Palopo), masing-masing mempunyai strategi untuk memperoleh barang-barang sebanyak-banyaknya. Said Ali (Syekh Ali) misalnya seorang pedagang yang berkedudukan di Kerajaan Luwu, mengadakan hubungan dagang yang sangat baik dengan Kerajaan Bone. Jalinan hubungan antara Puang Paluwai dengan para penguasa di kerajaan-kerajaan tersebut, juga memberikan kekuatan tersendiri terhadapnya. Bahkan Puang Paluwai, juga menjalin hubungan dengan penguasa-penguasa di Tana Toraja sendiri seperti Makale. Berdasarkan fakta-fakta dan strategi perdagangan yang

<sup>25</sup>T. Bigalke, *Op.cit.* hlm. 47.

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 46.

dilakukan oleh kedua pedagang tersebut di atas, menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai kekuatan dan dukungan dari para penguasa.

Kondisi di atas, mengakibatkan kedua pedagang tersebut, bebas untuk mengadakan perdagangan atau pengumpulan kopi di pasar-pasar yang ada. Pasar Rantebua, pasar Panggala, pasar Kalambe<sup>27</sup> dan lain-lain menjadi tempat para pedagang untuk mengadakan hubungan langsung baik dengan petani, maupun dengan para pedagang lainnya. Demikian juga kedua pedagang yang pada masa itu dapat dikatakan pedagang besar untuk dua jalur perdagangan kopi di Tana Toraja. Wilayah yang sama, dengan objek yang sama, membuahkan konsekuensi terjadinya masalah kesalahpahaman antara kedua pedagang tersebut. Pertentangan kedua pedagang tersebut, meningkat menjadi pertentangan antara kerajaan yakni di satu pihak Kerajaan Luwu yang mempunyai hubungan darah dengan Said Ali dan kerajaan-kerajaan Sidenreng, Enrekang, Maiwa dan Duri yang mempunyai hubungan baik dengan Puang Paluwai (pedagang yang berasal dari Pare-Pare).

Latarbelakang pertentangan kedua pedagang diikuti oleh ikut sertanya para penguasa lokal, mengakibatkan terjadinya perang. Perang ini bukan saja perang antara pedagang; tetapi melibatkan para penguasa (para prajurit

<sup>27</sup>ibid. hlm. 36.

kerajaan). Ini menunjukkan bahwa kedua pedagang tadi masing-masing melaksanakan perdagangan dengan politik yang kuat, yakni dengan mengikutsertakan penguasa. Sisi lain bahwa latarbelakang ini juga mengakibatkan pertentangan yang diakhiri oleh perang.

Dalam sebuah sumber lokal tentang perang kopi dikatakan bahwa perang kopi di Tana Toraja terjadi pada tahun 1898 karena pertentangan para pedagang kopi dari Pare-Pare yang bernama Puanna Paluwai dengan pedagang kopi dari Palopo bernama Syekh Ali (Said Ali, menurut T.Bigalke). Selanjutnya dikatakan bahwa tentara Luwu berpihak pada Syekh Ali sedangkan tentara gabungan kepada Puanna Paluwai. Tentara gabungan yang dimaksud adalah tentara yang berasal dari Sidenreng, Rappang, Maiwa dan Enrekang<sup>28</sup>.

Menurut laporan yang tercatat dalam lontarak, dikatakan tentara gabungan ini ke Toraja melawan tentara Luwu atas permintaan Puang Torongko Arung Makale kepada Adatuang Sidenreng melalui Arung Enrekang. Permintaan itu dilakukan dengan mengutus seorang anaknya yang bernama Manukkallo untuk datang bersama Arung Enrekang ke Sidenreng. Manukkallo selanjutnya tinggal di Sidenreng

28p.Palisuri, Kajian Lontarak Enrekang, Kerajaan Enrekang dan Kepenimpinan Raja-Raja Enrekang. (Ujung Pandang : Makalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Massenrempulu, 1989), hlm. 8.

Adatuang Sidenreng yang akan bersama-sama tentara gabungan ke Tana Toraja, yang sekaligus sebagai penunjuk jalan.

Perang yang terjadi antara Puanna Paluwai yang dibantu oleh tentara gabungan Sidenreng, Maiwa dan Enrekang, melawan Syekh Ali (Said Ali) yang dibantu oleh tentara Kerajaan Luwu yang berakhir dengan kekalahan Luwu. Dalam tulisan kajian lontarak Enrekang dikatakan tentara Sidenreng dalam perang itu dipimpin oleh Mayaro La Tutu Arung Carawali, Anre Guru dan Pangngala Lompona Sidenreng La Tondo Wa Situru. Tentara Enrekang dipimpin oleh Mayaro La Oddang. Tentara Maiwa dipimpin oleh Baso Tummataopi dan Mayaro La Balloke. Sedangkan tentara Enrekang dipimpin oleh Sigara Arung Lalo, Mayaro Salo Andi Palusuri dan Kapitang Pasulu Wabasara<sup>29</sup>.

Karena tentara Luwu kalah dari tentara gabungan, maka selanjutnya Syekh Ali (Said Ali) meminta bantuan kepada Kerajaan Bone. Bantuan Kerajaan Bone terhadap Kerajaan Luwu dalam perang ini dipimpin Petta-Petta Punggawa Bone. Atas bantuan tentara Kerajaan Bone, Luwu dapat mengalahkan tentara gabungan dan mengusir tentara gabungan itu dari Tana Toraja. Dikemukakan bahwa setiap orang yang berbahasa Bugis ditangkap atau dibunuh. Kondisi ini sebagai akibat perang di Tana Toraja, membuat kecemasan terhadap Puang

<sup>29</sup>ibid. hlm. 7. lihat juga T. Bigalke, *Op.cit.* hlm. 49-50.

Randanan (Penguasa Mengkendek Tana Toraja) sehingga beliau kembali datang kepada Arung Enrekang untuk meminta bantuan agar tentara Luwu meninggalkan Tana Toraja<sup>30</sup>. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Arung Enrekang dengan mengutus Latanro III Puang Janggo Arung Buttu<sup>31</sup>, ke Tana Toraja dan tinggal di Sillanan (Tana Toraja).

Datangnya utusan Arung Enrekang di Sillanan Tana Toraja, diketahui oleh Petta Punggawa Bone maka diutuslah seorang menemui Arung Buttu di Sillanan dengan berkata :

"Nasuroko Petta Punggawa Bone Engkar di Rantetayo makkadae laoko ri Arung Buttu nabaja angnga lao ri Bamba Puang mattarru lao ri Sidenreng".

Latanro Arung Buttu menjawab :  
Napasankak Ambekku makkada narekko engkae surona iyarega na akua Arung Bone na Sidenreng naola, natana naura naola tampending pura-purai abali adammu. Iyanna nana marekko mitta naola man matekkeng aruntu, messongkok kaluppang, macare-macare upaka labbi sibawa upaka rajana<sup>32</sup>.

Terjemahannya :

"Saya diutus oleh Petta Punggawa Bone di Rantetayo bahwa datanglah kepada Arung Buttu, agar sekiranya dapat memberikan jalan melalui Bamba Puang terus ke Sidenreng".

Jawaban Arung Buttu :

Saya dipesan oleh Ayahnya (Arung Enrekang), bahwa kalau ada utusan Petta Punggawa Bone atau beliau sendiri yang datang, katakan bahwa kalau Sidenreng

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 6.

<sup>31</sup>Buttu adalah salah satu kerajaan kecil yang merupakan Sili dari Kerajaan Enrekang.

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 6.

akan dilewati, atau Mandar yang dilalui, maka saya akan menentangnya (perkataannya). Tapi kalau beliau melalui peitta, maka hal itu lebih baik dan akan saya hormati.

Dengan jawaban itu, berarti tentara gabungan masih bersiap berperang sehingga tentara Bone melewati Sidenreng, Enrekang, atau Mandar. Karena itu Petta Punggawa dari Bone kembali melewati Palopo. Perang kopi dimenangkan oleh tentara Luwu, namun akhirnya perdagangan kopi berada di tangan para penguasa termasuk penguasa lokal (raja) dan pemerintah Belanda.



## BAB IV CAMPUR TANGAN KOLONIAL

### A. Kebliaksanaan Ekonomi Hindia Belanda

Paroh kedua abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20 merupakan kurun waktu yang cukup panjang, dengan perubahan - perubahan tentang pola - pola ekonomi pemerintahan Hindia Belanda. Lalu munculnya partai liberal, yang berbicara tentang kepentingan liberisasi ekonomi Hindia Belanda<sup>1</sup>. Berdasarkan pada konsep itulah, maka selanjutnya pada tahun 1854 muncul suatu peraturan pemerintah ( Regeering Reglement ) yang memuat tentang peraturan dasar bagi pemerintahan kolonial. Isi pokok peraturan ini menurut Edward L. Poelinggomang, terdiri atas prinsip liberal tentang kebebasan individu, keamanan, hak - hak dan usaha - usaha. Sebenarnya inti peraturan ini adalah menyangkut kebebasan berusaha, bahkan sistim tanam ( Cultur Stelsel ) diupayakan untuk dihapuskan.

Penerapan liberalisme kolonial seperti diatas tersebut, dengan sendirinya akan mempengaruhi kebijaksanaan - kebijaksanaan ekonomi lokal khususnya di Sulawesi Selatan termasuk dalam hal ini perdagangan kopi di Tana Toraja. Demikian juga pengaruh itu sangat menentukan bagi status pelabuhan Makassar yakni sebagai

<sup>1</sup>Edward L. Poelinggomang, *Op.cit.*, hlm. 85.



pelabuhan transit dengan ketentuan pajak dan barang melalui pelabuhan ini<sup>2</sup>.

Masalah lain yakni munculnya pemberontakan-pemberontakan raja-raja di Sulawesi Selatan, seperti pemberontakan Karaeng di Bonto-Bonto di wilayah Afdeling Nootheer Districten (pemerintahan distrik-distrik utara) dan Marakdia Kappe di Mandar pada akhir tahun 1873<sup>3</sup>. Perlawanan ini dengan sendirinya membutuhkan dana besar untuk pembiayaan perang. Untuk mengantisipasi kekurangan dana, pemerintah Hindia Belanda mengadakan penelitian tentang status pelabuhan bebas. Bagi pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan termasuk termasuk Makassar, untuk menjadikan pelabuhan wajib pajak. Namun demikian sebaliknya penetapan pelabuhan Makassar dan pelabuhan-pelabuhan lainnya menjadi pelabuhan wajib pajak juga membutuhkan dana yang tidak kecil, utamanya sarana dan prasarana serta upah bagi pekerja. Bahkan penetapan pajak ekspor dan impor tidak akan memberikan keuntungan bagi penduduk, tetapi justru sebaliknya akan memerosotkan pendapatan penduduk. Kalau hal ini terjadi, maka ada kemungkinan akan terjadi kemerosotan tanaman, dagang dan monopoli keluarga penguasa atau raja. Hal ini seperti yang

<sup>2</sup>Mengenai pajak barang-barang yang masuk dan keluar di pelabuhan Makassar pada tahun 1872 lihat Edward L. Poelinggomang, *Ibid.*, hlm. 86 catatan kaki 116.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 86.

terjadi di Bone, untuk pembelian kopi yang dimonopoli oleh raja dan keluarganya.

Perlawanan raja-raja di Sulawesi Selatan seperti di atas, menuntut biaya besar, utamanya menyangkut pembiayaan ekspedisi militer, yang dilakukan sejak tahun 1872<sup>4</sup>. Perlawanan raja-raja di Sulawesi Selatan seperti ini, membawa kemunduran bagi pemerintahan Hindia Belanda, untuk hal itu pada perkembangan selanjutnya dikirim utusan ke berbagai kerajaan untuk mengadakan perjanjian dengan Belanda mengenai larangan untuk mengimport dan mengeksport senjata api, amunisi dan peralatan lainnya. Perjanjian ini diadakan dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan seperti dengan kerajaan Luwu pada April 1889 dan kerajaan Sidenreng pada tanggal 28 Oktober 1886<sup>5</sup>. Permasalahan lain yang dihadapi, pemerintahan Hindia Belanda untuk kurun waktu ini, yakni adanya suatu laporan tentang pelayaran di Makassar dan wilayah bagian lain pada 1890, yang mengatakan perniagaan di wilayah ini lebih pesat dalam hubungan dengan pedagang dari Singapura. Laporan ini juga diperkuat oleh laporan Braam Morris seperti perniagaan di pelabuhan Palopo, yang disebut setiap tahun secara teratur datang, kapal dari Singapura<sup>6</sup>. Permasalahan-permasalahan

<sup>4</sup>Ibid, hlm. 86.

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 92.

<sup>6</sup>Braam Morris. *Op. cit.* hlm. 16.

seperti munculnya ide ekonomi liberalisme, munculnya pemberontakan-pemberontakan raja-raja di Sulawesi Selatan dan ekspedisi militer yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda membutuhkan dana yang cukup besar. Dengan latar belakang ini, pemerintahan Hindia Belanda harus mencari jalan, dengan menerapkan pelabuhan Makassar dan pelabuhan-pelabuhan lainnya di Sulawesi Selatan menjadi pelabuhan wajib pajak. Bahkan dalam kajian Edward L. Poelinggomang dikatakan pada tahun 1900 pemerintahan mulai mengeluarkan berita kepada kerajaan-kerajaan sekutu dan sahabat, bahwa kebijaksanaan pelabuhan bebas akan dihapus dan kepada mereka diwajibkan membayar ganti rugi atau pemungutan pajak ekspor-impor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar dan ketentuan lain yang menyangkut pelayaran dan perdagangan<sup>7</sup>. Tembakau Tana Toraja untuk kurun waktu ini, berada di bawah Luwu berdasarkan atas kemenangannya atas perang kopi yang terjadi pada tahun 1898. Ketentuan ini dengan sendirinya akan meliputi pelabuhan Palopo dan pelabuhan Bone.

Kebijaksanaan ini, mendapat penolakan tegas dari pihak kerajaan Bone dan kerajaan Luwu. Oleh karena itu pada tahun 1904 Gubernur Sulawesi Cornelius Alexander Kroesen (1903-1906) memberikan pertimbangan kepada Pemerintah (surat tanggal 11 Februari 1904) untuk

<sup>7</sup>Edward L. Poelinggomang, *Op.cit.* hlm. 95.

mengadakan tindakan militer terhadap kerajaan Bone dan Luwu, yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat dan gigih menentang upaya atau kebijaksanaan wajib pajak.

Dengan latar belakang ini, Van Heutzs mencanangkan politik perluasan koloni yang dikonsepsikan secara euphimistis dengan istilah Pasificatie Politiek (politik perdamaian). Dalam suratnya kepada Gubernur Kroesen, tertanggal 14 Juli 1905 yang dibawa oleh pasukan ekspedisi militer tampak jelas keinginan pemerintah untuk menguasai seluruh Sulawesi Selatan. Dalam surat itu diperintahkan untuk memeriksa semua penguasa bumiputra mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani Korte Verklaring (pernyataan takluk) dalam kalimat yang singkat<sup>8</sup>.

Realisasi dari politik perdamaian (Pasificatie Politiek), yakni dengan penaklukan terhadap kerajaan Bone, yang akhirnya dikalahkan pada 30 Juli 1905 yang ditandai oleh penandatanganan pernyataan pendek (Korte Verklaring). Isi pokok Korte Verklaring itu adalah :

1. Pemerintah kerajaan diharuskan untuk menandatangani ketentuan penyerahan wilayahnya kepada pemerintahan Hindia Belanda.
2. Menyetujui ganti rugi pelaksanaan penarikan pajak ekspor dan impor.

<sup>8</sup>Ibid. hlm. 97.

3. Mengakui hak pemerintah Hindia Belanda dalam melaksanakan penguasaan pelabuhan dan menempatkan polisi pelabuhan di wilayahnya<sup>9</sup>.

Selanjutnya kebijaksanaan itu juga dipaksakan kepada kerajaan lainnya seperti Luwu, Sidenreng, Wajo dan Gowa. Beberapa kerajaan yang dikuasai ditempatkan pejabat pemerintahan Hindia Belanda untuk menangani langsung pemerintahan dan kegiatan perdagangan seperti Bone, Luwu dan Pare-Pare. Setelah kemenangan Belanda dalam ekspedisi militer maka diumumkan pembatalan pelabuhan bebas Makassar termasuk pelabuhan-pelabuhan lainnya di Sulawesi Selatan (Luwu, Bone dan Pare-Pare), maka pada tanggal 17 Juni 1906 dinyatakan bahwa Makassar menjadi pelabuhan wajib pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1906<sup>10</sup>.

Kebijaksanaan ekonomi Hindia Belanda seperti di atas, sangat mempengaruhi pola-pola perdagangan di Tana Toraja, dimana Tana Toraja sendiri berada di bawah penguasaan Kerajaan Luwu. Luwu merupakan salah satu kerajaan Bumi Putera yang diduduki langsung oleh pemerintah Belanda utamanya yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan.

#### B. Pendudukan Hindia Belanda 1905 - 1909

Pasificatie Politiek ( politik perdamaian )  
dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, sebagai

<sup>9</sup>ibid. hlm. 98.

<sup>10</sup>ibid. hlm. 98.

akibat dari kegagalan penyelesaian perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kerajaan - kerajaan pribumi. Konsep Pasificatie Politiek ini sesungguhnya tidak sampai berlaku di Sulawesi Selatan, akan tetapi latar belakang munculnya kebijaksanaan tersebut dapat dipengaruhi oleh keberadaan dan situasi politik yang berlaku di Sulawesi.

Suatu contoh dari penolakan kebijaksanaan - kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan, khususnya kerajaan - kerajaan yang berdaulat<sup>11</sup>, yakni adanya sistem pelabuhan wajib pajak yang direncanakan. Rencana tersebut telah disampaikan sejak tahun 1900 mendapat penolakan tegas dari kerajaan - kerajaan Bone, Luwu dan lain - lain. Penolakan itu didasarkan pada adanya ketidaksepakatan tarif ganti rugi atas pajak-pajak ekspor dan impor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar dan ketentuan lain menyangkut pelayaran dan perdagangan<sup>12</sup>.

Penolakan kerajaan - kerajaan di Sulawesi Selatan atas upaya tersebut, justru menjadi dorongan yang kuat bagi pelaksanaan penaklukan atas kerajaan - kerajaan di Sulawesi Selatan. Untuk hal itu oleh pemerintah sejak

<sup>11</sup>Abd. Razak Dg. Patunruk, 1983, Sejarah Gowa. (Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan), hlm. 110.

<sup>12</sup>Edward L. Poelinggomang, Op.cit. hlm. 95.

tahun 1904, ketika perang Aceh berhasil diakhiri, muncul keinginan pemerintah untuk segera menyelesaikan hambatan yang ada dan merealisasikan kebijaksanaan wajib pajak di Sulawesi Selatan, termasuk Luwu dan Tana Toraja. Gubernur Sulawesi Cornelius Alexander Kroesen ( 1903 - 1906 ), memberikan pertimbangan kepada pemerintah ( surat tanggal 11 Februari 1906 ) untuk melakukan tindakan militer khususnya bagi kerajaan Bone dan Luwu yang memiliki pengaruh yang kuat di wilayah itu dan menentang kebijaksanaan tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan fasifikasi di Sulawesi Selatan oleh pemerintah Hindia Belanda, disebutkan oleh Muhammad Abduh dan kawan-kawan, antara lain :

- a. Menciptakan keamanan untuk menjamin keberhasilan usaha penanaman modal swasta dan modal asing lainnya di Sulawesi.
- b. Menguasai tanah yang potensial untuk pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal swasta di Indonesia.
- c. Mencegah masuknya pengaruh bangsa asing lainnya, di kerajaan-kerajaan di luar Jawa<sup>13</sup>.

<sup>13</sup>Muhammad Abduh et.al. Sejarah perlawanan terimperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Selatan.  
 (Jakarta : Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985), hlm. 96.

Dengan tekad untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1905 mulai mengadakan tindakan militer terhadap kerajaan Bone. Tindakan yang dilakukan terhadap kerajaan Bone, disamping karena dianggap sangat gigih menentang kebijaksanaan upaya penghapusan pelabuhan bebas, juga dianggap bahwa kerajaan Bone pada masa itu cukup kuat yang melebihi kerajaan Gowa. Penyerangan dalam rangka fasifikasi terhadap kerajaan Bone dilakukan pada bulan Juni 1905, dimana pada masa itu kerajaan Bone berada dibawah pemerintahan La Pawawai Karaeng Segeri. Perang antara Bone dan Belanda pada masa itu, Bone dibantu oleh kerajaan - kerajaan lain diantaranya kerajaan Gowa, Sidenreng, Wajo dan lain - lain. Perlawanan Kerajaan Bone dapat dipatahkan pada tahun 1905, dengan ditangkapnya La Pawawai Karaeng Segeri pada 18 November 1915<sup>14</sup>.

Setelah penguasaan atas kerajaan Bone, maka perang yang hampir serentak di seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan juga pecah. Perang dengan kerajaan Gowa, Luwu, Sidenreng dan lain-lainnya dilancarkan. Dengan persiapan yang matang dan tentara-tentara yang terlatih baik dalam front-front pertempuran, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dapat dikalahkan. Akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut harus patuh dan mengakui kekuasaan

<sup>14</sup>Ibid. hlm. 111.



pemerintah Hindia Belanda dengan menandatangani Korte Verklaring (pernyataan pendek) yang berisikan tentang :

1. Raja - raja yang ditaklukkan mengaku tunduk kepada Belanda.
2. Mengakui daerah kerajaannya sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda.
3. Tidak akan berhubungan dengan pemerintah asing tanpa seijin dengan pemerintah Belanda<sup>15</sup>.

Korte Verklaring akhirnya ditandatangani oleh penguasa dari kerajaan-kerajaan dari Tana Toraja setelah melalui perjuangan dan perlawanan.

Dalam usaha mempertahankan diri dari serangan Belanda, pada saat itu yakni pada tahun 1905, di daerah Tana Toraja muncul pejuang-pejuang untuk menghimpun dan menyusun strategi perlawanan. Diantara pejuang-pejuang tersebut antara lain "Pongtiku", Pong Maramba, Puang Tawukau Makale bersana Ma'saruran bersana saudaranya Bombing di daerah Rano Bua Kayu<sup>16</sup>. Pemimpin-pemimpin tersebut di atas, berusaha untuk menggalang persatuan untuk melawan serdadu Belanda. Masyarakat Tana Toraja untuk kurun waktu ini, dapat diketahui dari data yang disajikan oleh T. Bigalke dalam "Young of the Toraja Save

<sup>15</sup>Edward L. Poelinggomang, Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar. (Jakarta : Tesis Universitas Indonesia, 1983), hlm. 2.

<sup>16</sup>T. Bigalke, Op.cit. hlm. 98.

Tratt in South Sulawesi, Slaving Bondage and Dependency in South East Asia"<sup>17</sup>. Populasi untuk setiap kampung-kampung yang terkenal, antara lain : Makale 11.000 orang, Sanggalla 11.000 orang, Mengkendek 10.500 orang, Bunga 1.400 orang, Kappa 500 orang, Simbuang 3.000 orang, Tikala 21.000 orang, Kesu 11.500 orang, Panggala 9.600 orang, Sa'dan 2.300 orang, Balusu 4.400 orang, Ma'dandan 1.600 orang dan Kussu sebanyak 300 orang. Jumlah penduduk yang cukup besar ini, merupakan potensi bagi Tana Toraja untuk melawan serdadu Belanda.

Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Toraja terhadap serdadu Belanda tersebut, cukup lama. Menurut T. Tangdilintin bahwa sebelum tentara Belanda memasuki Tana Toraja, yang masuk dari utara Kerajaan Luwu dari Palopo, para bangsawan Tana Toraja (pemimpin), mengeluarkan pernyataan untuk melawan kedatangan Belanda<sup>18</sup>. Persetujuan dan perjanjian itu, dilaksanakan di Buntu Peme Rantepao, yang kemudian dilanjutkan di Kalambe. Dalam musyawarah tersebut para bangsawan dan pemimpin di Tana Toraja untuk mengadakan perlawanan secara serentak. Perjanjian penyatuan kekuatan itu, akhirnya terpecah oleh kesalahpahaman antara pemimpin, sehingga pada akhirnya perlawanan hanya dilakukan untuk setiap kelompok.

17T. Bigalke. *Op.cit.* hlm. 354.

18T. Tangdilintin. *Op.cit.* hlm. 89.

Dalam catatan T. Tangdilintin disebutkan bahwa pahlawan yang paling terakhir ditaklukkan oleh serdadu Belanda adalah pejuang-pejuang yang berada dibawah pimpinan Pong Tiku. Perlawanan Pong Tiku selama berbulan-bulan lamanya dilakukan sampai di perbatasan Tana Toraja dengan kerajaan-kerajaan di sebelah selatan seperti Duri dan Massenrempulu dipatahkan oleh Belanda. Pong Tiku dikepung pada salah satu pegunungan di bagian utara Tana Toraja pada tanggal 30 Juni 1907 dan selanjutnya ditawan dan dibawa ke markas Belanda di Rantepao. Pongtiku kemudian ditembak mati oleh tentara Belanda pada tanggal 10 Juli 1907 di pinggir sungai Saddang kota Rantepao.

Kekalahan Pong Tiku sebagai pejuang yang mempertahankan Tana Toraja yang terakhir, merupakan awal pendudukan pemerintah Hindia Belanda sehubungan dengan taktik "Pasificatie Politiek" (politik perdamaian), yang pada dasarnya merupakan upaya pengamanan terhadap ekonomi dan perdagangan di daerah-daerah Sulawesi Selatan termasuk Tana Toraja. Dengan demikian kebijaksanaan selanjutnya berada di tangan pemerintah Hindia Belanda.

### C. Peranan Pemerintahan dan Kebijaksanaan Ekonomi Lokal

Setelah penandatanganan pernyataan pendek (Korte Verklaring), yakni pengakuan takluk bangsawan-bangsawan dan pejuang-pejuang Tana Toraja yang diakhiri dengan gugurnya Pongtiku pada tanggal 10 Juli 1907 yang secara administratif pemerintahan Tana Toraja berada dibawah

pemerintahan Hindia Belanda. Dengan demikian status yang dulunya hanya merupakan daerah atau wilayah sahabat, sebagai daerah yang tidak langsung dikuasai, berubah menjadi daerah yang dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan status dan struktur pemerintahan di Tana Toraja terjadi bersamaan dengan perubahan status pemerintahan secara keseluruhan di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan.

Penguasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan yakni terhadap kerajaan-kerajaan tidak dengan spontan diikuti dengan perubahan struktur pemerintahan tradisional secara total. Demikian juga halnya yang terjadi di Tana Toraja. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kekuasaan adat kepada tiap-tiap bangsawan yang berkuasa pada daerahnya masing-masing<sup>19</sup>. Pada setiap kelompok-kelompok adat tetap diberikan kepada pemimpin adat (tetua adatnya) untuk memimpin masyarakat, walaupun harus tunduk kepada pejabat pemerintahan Belanda yakni kontroluer yakni pejabat yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah Onder Afdeling.

Wilayah Tana Toraja sejak penguasaan Belanda pada awal abad XX dibagi kedalam tiga Onder Afdeling, sehingga sejak saat itu secara administrasi wilayah Tana Toraja terbagi tiga. Tana Toraja untuk kurun waktu ini pada

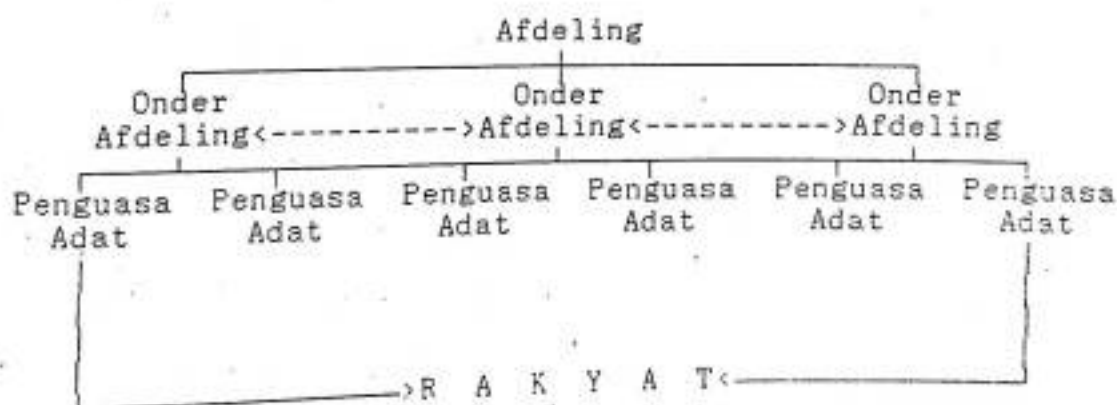
19T. Tangdilintin, *Op.cit.*, hlm. 70.



sebelah selatan berbatasan dengan Onder Afdeling Enrekang, pada bahagian barat yakni Onder Afdeling Mamasa. Sedangkan wilayah lainnya digabungkan dalam Afdeling Makale Rantepao dan sebagian lagi berada pada wilayah pemerintahan Afdeling Luwu. Seorang Asisten Residen memimpin wilayah Afdeling, merupakan pemimpin tertinggi di Tana Toraja. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah pemerintahan sejak penguasaan Belanda pada awal abad XX adalah sebagai berikut :

- a. Onderafdeling Enrekang digabung pada Afdeling Pare-Pare
- b. Onderafdeling Mamasa digabungkan pada Afdeling Mandar.
- c. Onderafdeling Makale Rantepao dan daerah Tana Toraja yang lainnya seperti daerah Basse Sangtempe, daerah Sako dan Rongkong digabungkan pada Afdeling Luwu<sup>20</sup>.

Sebagai gambaran, berikut struktur pemerintahan di Tana Toraja pada masa pemerintahan Hindia Belanda sejak 1907, sebagai berikut :



<sup>20</sup>Ibid. hlm. 70.

Keterangan :

—————> : Jalur perintah

<-----> : Jalur koordinasi perintah dan pelaksana adat.

Apabila kita perhatikan struktur pemerintahan tersebut di atas, menunjukkan bahwa penguasa adat, tetap langsung kepada rakyat. Namun demikian, ada satu catatan bahwa pemerintahan tersebut berada dibawah penguasaan pemerintah atau pejabat yang lebih tinggi yang dipegang oleh orang-orang Belanda. Ini berarti pemimpin adat, hanyalah pelaksana kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Melihat struktur pemerintahan tersebut, menunjukkan peranan pemerintah Hindia Belanda sangat besar bahkan menentukan, utamanya yang berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi. Apabila kita kembali kepada tujuan ekspedisi militer dan penguasaan daerah atas kerajaan - kerajaan di Sulawesi Selatan, terlihat bahwa penguasaan ekonomi sangat tinggi. Perubahan - perubahan kebijaksanaan ekonomi pemerintahan seperti penerapan pajak dan pelabuhan bebas sebagai salah satu contoh. Kemenangan Belanda dalam ekspedisi militer pada awal abad XX, menurut Edward L. Poelinggomang, justru dianggap oleh pemerintah Belanda bahwa dengan kemenangan tersebut akan menjadi peluang untuk mengadakan perdagangan dengan baik<sup>21</sup>. Kemenangan

<sup>21</sup>Edward L. Poelinggomang, *Op.cit.* hlm. 243.

tersebut, berarti perdagangan utamanya dari daerah - daerah produksi berada di tangan pemerintah Belanda. Kebijakan ekonomi lokal, hampir tidak ada, akan tetapi berdasarkan pada ketentuan dan kebijaksanaan ekonomi secara menyeluruh di Sulawesi Selatan.

Berkaitan dengan kebijaksanaan ekonomi lokal, pemerintahan melihat pada beberapa aspek. Aspek tersebut, utamanya yang menyangkut penarikan pajak dan eksploitasi hasil-hasil produksi rakyat. Mengenai penarikan seperti pajak manusia, pajak barang masuk dan pajak barang umum. Untuk pajak manusia, pada saat itu, oleh pemerintah ditetapkan besarnya pajak sebesar f. 5 perkepala. Pajak barang-barang masuk di suatu daerah (termasuk Tana Toraja), dikenakan pajak sebesar 5 %. Sedangkan pajak kopi, sebesar f. 2½<sup>22</sup>. Sebagai bahan banding untuk kebijaksanaan ekonomi berupa pajak di daerah Tana Toraja, berikut laporan Braam Morris tentang pajak yang berlaku di Luwu pada kurun waktu 1888: Penghasilan raja terutama terdiri dari bea masuk dan keluar, yang dipungut, di pelabuhan-pelabuhan dan setiap tahunnya di taksir kira-kira 15.000 gulden jumlahnya: yang merupakan penghasilan, dari kewajiban berbagai vasal (lili), berupa pemasukan.

---

<sup>22</sup>Penjelasan mengenai pajak barang ekspor dan import, *Ibid.*, hlm. 94 pada catatan kaki nomor 143-145. Bandingkan dengan pajak yang berlaku di Luwu lihat Braam Morris, *Op.cit.*, hlm. 54.

Pajak-pajak keluar dan masuk dibagi oleh raja bersama dengan keempat dari anggota Hadat penting, sama halnya dengan semua upeti, yang dibawa naik dalam natura (bentuk barang).

Selebihnya anggota-anggota Hadat dan kepala-kepala wilayah menikmati hanya pemasukan yang dipungut di negerinya, Sa'ssung minanga (pajak angkut melalui kali), Sa'ssung ala' atau pajak hutan, dipenuhi dengan izin untuk memungut atau menebang kayu pertukangan, dan Sa'ssung biasa, ialah wang pabean atau pajak transport dari pengangkutan kopi dan lain-lain barang-barang dagangan.

Selanjutnya Sa'ssung pasa atau bea pasar dan baratu bea yang dikenakan kepada bermacam - macam permainan judi.

Dimana sahbandar-sahbandar berkedudukan semua bea-bea masuk dan keluar jatuh kepada raja, kalau tidak juga menjadi penghasilan dari kepala-kepala wilayah.

Orang-orang Tana Toraja berkewajiban untuk setiap tahun membawa upeti dalam bentuk natura kepada raja, dalam jumlah tertentu dari semua yang dihasilkan negerinya, seperti emas, besi, kelewang, lilin, madu, damar kawali atau badik, tombak, rotan, sagu, kopi, tikar dan bakul-bakul. Kadang kala juga hamba-hamba, kerbau dan kuda masing-masing sesuai dengan kemampuannya<sup>23</sup>. Pajak-pajak tersebut di atas, dibayarkan oleh penduduk di wilayah Tana

<sup>23</sup>Ibid, hlm. 54.



Toraja sebagian berada di bawah penguasaan Afdeling Luwu, disamping kebijaksanaan ekonomi yang menyeluruh di Sulawesi Selatan.

#### D. Perkembangan Perdagangan

Perdagangan di Tana Toraja untuk kurun waktu pertengahan kedua abad IX sampai pada awal abad XX, menunjukkan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut, yakni perdagangan (jual-beli) dalam bentuk barter<sup>24</sup>, bentuk korperation<sup>25</sup> dan sistem perdagangan monopoli penguasa<sup>26</sup>. Bentuk-bentuk perdagangan tersebut di atas, walaupun contoh itu hanya menunjuk pada pola perdagangan bentuk barter di Luwu, korperation di Tana Toraja dan monopoli dagang dengan menunjuk pada perdagangan Makassar, namun pola-pola perdagangan tersebut dianggap pernah juga belaku di wilayah Tana Toraja.

Apabila kita bertolak pada penguasaan Hindia Belanda sejak penandatanganan pembaharuan atas perjanjian Bongaya pada tahun 1824, menunjukkan bahwa pola perdagangan dan kebijaksanaan perdagangan di Tana Toraja belum dipengaruhi langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini didasarkan pada bentuk atau struktur wilayah Tana Toraja sebagai daerah sahabat yang tidak dikuasai langsung. Kondisi ini

<sup>24</sup>Braam Morris, Op.cit., hlm. 18.

<sup>25</sup>T. Bigalke, Op.cit., hlm. 38.

<sup>26</sup>Edward L. Poelinggomang, Op.cit., hlm. 138.

masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengadakan perdagangan langsung dengan para pedagang yang datang dari luar. Seperti dijelaskan di muka, bahwa para pedagang di Tana Toraja sejak abad ke-17 telah datang para pedagang dari Bugis, Arab, Cina, Makassar dan lain-lainnya. Catatan bahwa, perubahan pola-pola perdagangan di Tana Toraja sejak penandatanganan pembaharuan perjanjian Bongaya dengan sendirinya didasarkan pada pola kebijaksanaan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Sehubungan dengan pola perdagangan dalam bentuk barter, dilaporkan oleh Braam Morris, bahwa sistem perdagangan seperti ini masih berlangsung di wilayah Luwu dan Toraja sampai pada kurun waktu 1890. Laporan tersebut antara lain dikatakan bahwa perdagangan yang teratur dalam bentuk barang-barang dagangan sebenarnya tidak ada, karena semua hasil diperoleh dengan jalan barter, kecuali kopi yang sekali ditimbang langsung dibeli dengan uang tunai<sup>27</sup>.

Berdasarkan laporan di atas, menunjukkan bahwa pada akhir abad ke-19 perdagangan di Tana Toraja terbagi dalam dua bentuk, yakni perdagangan dengan jual-beli (penakaian alat beli) dan perdagangan dengan barter (penggantian

<sup>27</sup>Mengenai jual beli kopi menurut catatan T. Bigalke, disebutkan bahwa dalam perdagangan kopi pada akhir abad XIX dipergunakan uang "oesng" yakni coin yang dikenal oleh masyarakat Tana Toraja "Doik kamek" (chichen, money). *Op.cit.*, hlm. 38.

barang dengan barang). Adanya dua bentuk perdagangan seperti ini, kelihatannya disesuaikan dengan bentuk atau jenis barang. Walaupun tidak ada data yang jelas tentang barang-barang barter. Penjelasan mengenai bentuk barter ini, hanya disebutkan bahwa barang-barang kerajinan tangan seperti bakul-bakul, tikar-tikar halus, kelewang, keris, tombak, oleh orang-orang Toraja dengan penduduk pantai ditukar dengan garam, kain kasar, kain tenun, tembikar dan barang-barang tembaga<sup>28</sup>.

Ada satu hal yang cukup menarik dari laporan Braam Morris tersebut, yakni kecilnya peranan orang-orang pribumi dalam perdagangan. Dikatakan oleh beliau bahwa tidak dapat diingkari kecilnya peranan penduduk pribumi, karena seluruh perdagangan berada di tangan orang-orang Arab, Cina, Makassar dan Bugis yang datang dan tinggal untuk sementara, tetapi memperoleh kekayaan yang berlimpah<sup>29</sup>.

Menganamati laporan di atas, kelihatannya peranan penduduk pribumi dalam hal ini orang-orang asli Toraja sangat kecil, dalam arti menjadi pedagang. Mereka hanya sebagai penghasil/petani, yang selanjutnya menjual kepada para pedagang perantara, atau langsung menjualnya kepada pedagang yang langsung mengekspor.

<sup>28</sup>Braam Morris. *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 16.

Sebelum abad XX, juga dilaporkan oleh Braam Morris, bahwa setiap tahun secara teratur datang di kota Palopo beberapa kapal dari Singapura, Pontianak, Wajo dan muara dari sungai Cenrana (Pellima) serta dari Makassar untuk mengambil produksi. Laporan ini menunjukkan bahwa di Palopo sebagai salah satu jalur perdagangan hasil-hasil produksi dari Tana Toraja telah datang orang-orang / kapal-kapal asing. Ini berarti bahwa perdagangan berupa ekspor langsung masih berjalan. Kurun waktu ini oleh Edward L. Poelinggomang, terjadi pada kurun waktu 1876<sup>30</sup>.

Untuk bentuk perdagangan korperation, yakni bentuk perdagangan kerja sama. Bentuk dagang seperti ini disebutkan oleh Edward L. Poelinggomang utamanya berkaitan dengan kerja sama dalam bidang angkutan. Kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayaran (kebutuhan akan jumlah yang layak dan pemakaian kapalnya), dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah Belanda untuk memperkuat kedudukan ekonominya. Sebagai contoh hal ini, yakni sejak tahun 1833 telah terdaftar dua kapal skamer, sebuah truk (daya angkut 282 ton). Pada tahun 1873 pedagang Eropa telah memiliki sepuluh kapal, Cina memiliki enam kapal dan Bumiputra memiliki enam kapal<sup>31</sup>. Walaupun kondisi ini merosot pada tahun 1903 yang tercatat hanya 13 buah kapal.

<sup>30</sup>Edward L. Poelinggomang, *Op.cit.* hlm. 190-191.

<sup>31</sup>*ibid.* hlm. 208.

Kerjasama pemerintah dengan usaha-usaha perkembangan alat angkut di laut, dengan sendirinya agar hasil-hasil petani di pedalaman dapat diamati melalui penguasaannya. Demikian juga halnya dengan hasil-hasil produksi, termasuk produksi kopi di Tana Toraja, baik yang melalui jalur timur Palopo, maupun yang melalui jalur selatan Sidenreng dan pelabuhan Pare-Pare.

Pola perdagangan lain yang dianggap berkaitan langsung dengan perdagangan kopi di Tana Toraja yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda, yakni perjanjian kerja. Sebagai contoh, yakni upaya Van Gennep untuk menjalin perjanjian jual-beli dengan raja Gowa untuk produksi kopinya dan kontrak dengan Tan Soe untuk pembelian barang mutiara, dengan memberi modal sebanyak fl. 10.000,-. Sedangkan pada tahun 1876 pemerintah Hindia Belanda, menyediakan modal untuk berdagang kopi sebesar fl. 1.000.000,-. Demikian juga dalam hal penetapan harga. Ketika harga kopi Bina fl. 32 dan kopi Pare-Pare fl. 34, setiap pikul. Raja Gowa menawarkan harga fl. 40,50 setiap pikul, karena harga kopi Toraja (Bungi) di pasaran adalah fl. 42,50 setiap pikul<sup>32</sup>.

Pada kurun waktu akhir abad XIX dan di awal abad XX yang dinyatakan oleh Edward L. Poelinggomeng (1892-1908).

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 228.



sebagai kepincangan neraca perdagangan<sup>33</sup>, namun demikian ditambahkan bahwa setelah penaklukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, pemerintah Belanda kembali menerapkan kebijaksanaan wajib pajak. Dikatakan bahwa pada kurun waktu ini, pemerintah pertama-tama melangkah memperkuat kemampuan untuk dapat memantapkan kedudukan politiknya, kemudian bergiat memenuhi kepentingan ekonominya<sup>34</sup>.

Penguasaan dan penerapan kembali kebijaksanaan wajib pajak, dengan sendirinya akan mempengaruhi hak perdagangan di Tana Toraja. Pajak perdagangan, pajak barang yang keluar masuk akan digalakkan dan hak monopoli dengan sendirinya akan muncul kembali. Pola perdagangan kembali berada pada kebijaksanaan pemerintah Belanda. Pajak dan upeti yang dilaksanakan melalui pemerintah/penguasa adat dengan sendirinya berjalan kembali. Perdagangan kopi kembali berada di tangan pemerintah Hindia Belanda.

---

<sup>33</sup> Ibid. hlm. 194.

<sup>34</sup> Ibid. hlm. 244.

## BAB V

## P E N U T U P

Penanaman kopi secara besar-besaran di Sulawesi Selatan termasuk Tana Toraja, dilatarbelakangi oleh beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain : Pertama kopi sejak pertengahan abad ke-17 telah menjadi kebutuhan rumah tangga seperti di Inggris, Eropa dan Amerika; kedua upaya pemerintah Belanda untuk meningkatkan perniagaan di Sulawesi Selatan, juga sebagai upaya penanaman modal; ketiga sebagai jalan bagi pemerintah untuk penarikan pajak dari hasil tanaman komoditi, dan yang terakhir yaitu kondisi wilayah yang cocok untuk tanaman komoditi (kopi).

Perdagangan kopi di Tana Toraja sejak awal, selalu diikuti oleh politik perdagangan, baik yang diperankan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maupun yang diperankan oleh pedagang-pedagang pribumi, khususnya pedagang yang datangnya dari Bugis-Makassar. Keikutsertaan politik dalam perdagangan di Tana Toraja, seperti terlihat pada pecahnya perang kerajaan-kerajaan dari Bugis, Sidenreng, Maiwa dan Enrekang dengan kerajaan Luwu. Perang itu dikenal dengan nama perang kopi. Perang kopi itu terjadi sebagai akibat dari persaingan dagang antara pedagang dari Sidenreng dan pedagang yang datangnya dari Luwu. Sedangkan keikutsertaan politik Hindia Belanda, seperti terjadinya ekspedisi dan penguasaan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk Tana Toraja pada awal abad XX.

Persaingan para pedagang kopi di Tana Toraja, merupakan konsekuensi dari adanya dua jalur dagang. Adanya jalur timur melalui laut pantai Palopo dan jalur selatan melalui darat, dari Sidenreng ke pelabuhan Pare-Pare. Persaingan yang mengakibatkan keikutsertaan pemerintah Hindia Belanda, secara global untuk memperkuat kedudukan ekonominya, juga karena perubahan bentuk-bentuk perdagangan seperti munculnya ekspor langsung oleh orang-orang pribumi dan campur tangan pedagang-pedagang asing.

Mengenai peranan pemerintah Hindia Belanda dalam kebijaksanaan perdagangan kopi sangat besar, yang ditandai oleh munculnya perubahan-perubahan ekonomi yang sasarannya tidak lain untuk mengeruk keuntungan yang besar. Sisi lain kebijaksanaan ekonomi lokal hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali mengenai perubahan harga yang ditentukan oleh mutu kopi.

Perubahan-perubahan perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan sendirinya juga mempengaruhi pola-pola perdagangan kopi di Tana Toraja. Walaupun demikian, penulis melihat bahwa pola perdagangan kopi di Tana Toraja tidak dilakukan dalam bentuk barter (kecuali barang lain), akan tetapi lebih dominan dilaksanakan pola perdagangan antara (pedagang perantara) dan monopoli pemerintah melalui penguasa lokal. Bahkan kelihatannya perkembangan terakhir perdagangan kopi di Tana Toraja, adalah dalam bentuk monopoli pemerintah Belanda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bigalke, T. 1981. A Social History of Tana Toraja 1860-1965. Dissertation University of Wisconsin, Medison USA.
- Kamaruddin, et.al. 1985/1986. Pengkajian ( Transliterasi dan Terjemahan ) Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallo ( Naskah Makassar ). ( Ujung Pandang : Depdikbud Proyek Pengkajian dan Penelitian Kebudayaan Sul-Sel La Galigo ).
- Mattulada, 1984. Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah ( 1500-1700 ). ( Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan ).
- Limbugau, Daud, 1985. Terbentuknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan 1824-1874. (Jogjakarta: Tesis Pasca Sarjana UGM)
- Morris, Braam, Het Landschap Luhu Getroken Uit een Rapport Van Den Gouverneur Van Celebes. (S-Graven Hagen: Martinus Nijhoff).
- \_\_\_\_\_, 1912. Nota Van Toelivting Omtrent de Federatie Doeri of Talloe Batoe Papan Bestaande Uit de Landschappe Malua, Allag Buntu Batoe. ( Ltb. Delliv ).
- Muhammad Abduh, 1985. Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan. ( Jakarta : Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional )
- Mukhlis, 1993. Dimensi Sosial Budaya Sejarah Sulawesi Selatan. ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).
- Poelinggomang, Edward. L. 1993. "Transportasi dan Jaringan Perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur pada Periode Kolonial". ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).
- \_\_\_\_\_, 1991. Proteksi dan Perdagangan Bebas Kajian Tentang Perdagangan Makassar Abad ke - 19. ( Amsterdam : Centrale Huisdrukkerij ).
- \_\_\_\_\_, 1993. "Perdagangan Bebas di Makassar Pada Abad ke-19 Tinjauan Dari Dimensi Sosial Politik". ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).

- Palisuri, 1989. "Kajian Lontarak Enrekang, Kersjaan Enrekang dan Kepemimpinan Raja - Raja Enrekang". ( Ujung Pandang : Makalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Massenrempulu ).
- Sulistyo, Bambang, 1993. "Perdagangan Bebas di Makassar Pada Abad XIX Tinjauan Dari Dimensi Sosial Politik". ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).
- Tangdilintin, T. 1977. Sejarah dan Kebudayaan Tana Toraja. ( Ujung Pandang : Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan ).
- Tosibo, Anwar, 1993. "Hamba Sahaya dan Orang Berhutang Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Pada Abad XIX". ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).

- Palisuri, 1989. "Kajian Lontarak Enrekang, Kerajaan Enrekang dan Kepemimpinan Raja - Raja Enrekang". ( Ujung Pandang : Makalah Seminar Sejarah dan Kebudayaan Massenrempulu ).
- Sulistyo, Bambang, 1993. "Perdagangan Bebas di Makassar Pada Abad XIX Tinjauan Dari Dimensi Sosial Politik". ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).
- Tangdilintin, T. 1977. Sejarah dan Kebudayaan Tana Toraja. ( Ujung Pandang : Depdikbud, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan ).
- Tosibo, Anwar, 1993. "Hamba Sahaya dan Orang Berhutang Sejarah Perbudakan di Sulawesi Selatan Pada Abad XIX". ( Ujung Pandang : MSI Cabang Sulawesi Selatan ).